



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang	:	2019 – 2020
Masa Persidangan	:	IV (Empat)
Rapat ke	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	MA, MPR, DPD, KY, MK
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 24 Juni 2020
Pukul	:	14.00 WIB – 17.05 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	:	Herman Hery (Ketua Komisi III DPR RI) Trimedya Panjaitan, SH., M.H. (Watua Komisi III DPR RI)
Sekretaris	:	Novianti, S.E.
Acara	:	Membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2021
Hadir	:	A. Anggota DPR RI : 39 dari 53 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

3 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. H. Ahmad Sahroni, S.E., M. Hum.
3. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

11 orang dari 11 orang Anggota:

1. M. Nurdin
2. Trimedya Panjaitan
3. Masinton Pasaribu
4. Idham Samawi
5. Bambang DH (virtual)
6. Arteria Dahlan
7. Ichsan Soelistio
8. Marinus Gea
9. I Wayan Sudirta (virtual)
10. Agustiar Sabran (virtual)
11. H. Safaruddin

/2. Fraksi Partai Golongan Karya

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si
2. Ir. Hj. Sari Yulianti, MT.
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn.
4. Supriansa, SH., MH.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habiburokhman, SH., MH
2. Romo H.R. Muhammad Syafi'i., SH., M.Hum
3. Muhammad Rahul (virtual)
4. H. Rahmat Muhajirin, SH (virtual)
5. Bambang Haryadi, SE

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, SH., M.Hum., LL.M
2. Eva Yuliana, M.Si.
3. Yessy Melanie, SE. (virtual)
4. Ary Egahni Ben Bahat, SH.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Moh. Rano Al Fath, SH., MH
2. N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Ir. H. Mulyadi
2. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., MH., ACCS
3. H. Santoso, SH
4. Dr. Benny Kabur Harman, SH.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, SH., MH

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam (virtual)
2. Sarifuddin Sudding, SH., MH.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H. Arsul Sani., SH., M.Si

B. Undangan:

1. Sekretaris M.A. beserta jajarannya
2. Sekjen Komisi Yudisial beserta jajarannya
3. Sekjen Mahkamah Konstitusi beserta jajaran
4. Sekjen MPR RI beserta jajaran
5. Sekjen DPD RI beserta jajaran

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT/ F.PDI-P (HERMAN HERY):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Sekretaris Mahkamah Agung beserta jajarannya,
Yang terhormat Setjen Komisi Yudisial beserta jajarannya,
Yang terhormat Setjen Mahkamah Konstitusi beserta jajarannya,
Yang terhormat Setjen MPR RI beserta jajarannya dan yang terhormat Setjen
DPD RI beserta jajarannya,
Serta hadirin yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkenannya kita dapat melaksanakan menghadiri rapat dengar pendapat hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat dengar pendapat hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir sebanyak 39 Anggota 9 Fraksi dari 53 orang Anggota Komisi III. Oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat dengar pendapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Sekretaris Mahkamah Agung, Setjen Komisi Yudisial, Setjen Mahkamah Konstitusi, Setjen MPR dan Setjen DPD RI atas kesediaan dalam memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat hari ini. Demikian juga kepada para Anggota Komisi III DPR RI kami mengucapkan terima kasih. Rapat ini semula akan dipimpin Oleh Bapak Adies Kadir tetapi beliau hari ini berhalangan hadir dan saya sudah terjadwal dengan agenda yang sudah dijadwal sebelumnya dan tidak dapat ditunda. Maka berdasarkan Pasal 254 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib yang menyebutkan apabila Ketua rapat berhalangan rapat dipimpin oleh salah seorang Pimpinan lainnya dan apabila semua Pimpinan berhalangan Ketua rapat dipilih dari oleh peserta rapat yang hadir. Untuk itu kami meminta persetujuan Anggota Komisi III DPR RI. Apakah Pimpinan rapat hari ini dapat dipilih dari salah satu Anggota Komisi III DPR RI?

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian karena kita memilih Pimpinan rapat tadi berdasarkan kesepakatan Pak Trimedya Panjaitan untuk memimpin rapat ini. Baik kita teruskan dulu.

Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya Pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat dengar pendapat pada hari ini yakni:

1. Pembahasan RKA-KL dan RKP-KL tahun 2021
2. Tanya jawab
3. Penutup

Kami juga ingin mendapat persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 17.00 WIB?

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Demikian pengantar kami dan untuk mempersingkat waktu kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung, Setjen Komisi Yudisial, Setjen Mahkamah Konstitusi, Setjen MPR dan Setjen DPD RI untuk menyampaikan penjelasannya secara bergantian. Kami persilakan dari Setjen DPD RI.

SETJEN DPD RI (Dr. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam sejahtera.

Salam hormat kepada Pimpinan dan teman-teman sekalian yang kami hormati dan kami banggakan,

Izinkan kami pada siang hari ini sesuai amanah yang diberikan oleh Bapak Pimpinan sidang untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan hal-hal terkait dengan penjelasan Sekretaris Jenderal DPD RI tentang rencana kerja anggaran DPD RI tahun 2021. Namun izinkan juga pada kesempatan ini kami untuk menyampaikan *progres* dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan anggaran tahun 2019 dengan pelaksanaan anggaran tahun 2020. Yang pertama Bapak Pimpinan kami sampaikan dan kami laporkan bahwa realisasi anggaran DPD RI tahun anggaran 2019 berdasarkan surat Menteri Keuangan tanggal 18 Oktober 2018 pada tahun 2019 kami menerima anggaran Rp 1.087.000.000.000 yang terbagi menjadi dua satker terdiri dari Rp 827 miliar sekian dan 259. Dari Rp 1.087.000.000.000 yang kami peroleh sampai dengan 31 Desember 2019 *alhamdulillah* telah bisa kami laksanakan secara baik dan direalisasikan sebesar Rp 1.051.000.000.000 dan seterusnya sehingga target penyerapan anggaran pada tahun 2019 adalah 96,77%.

Dengan rincian sebagaimana terlampir pada satker Dewan terdapat penyerapan anggaran sebesar 98,09%, pada satker Setjen 92,54%. Adapun hasil yang kami peroleh dan kami laksanakan berdasarkan anggaran yang telah kami peroleh pada tahun 2019 terdapat 44 materi atau produk legislasi berupa RUU usul inisiatif DPD RI, pandangan pendapat atas RUU maupun

pertimbangan dan pengawasan DPD RI atas Undang-Undang tertentu maupun prolegnas usul DPD RI dengan rincian sebagaimana terlampir mulai dari RUU usul inisiatif 10 RUU, pandangan pendapat atas RUU 2 RUU, hasil pertimbangan DPD RI 4 materi, 19 materi pada hasil pengawasan DPD RI dan pertimbangan DPD RI dengan 5 materi dan usul DPD RI 1 materi serta 3 rekomendasi DPD RI. Itu capaian target *output* kinerja kami pada tahun anggaran 2019 yang lalu.

Dapat kami laporkan pada kesempatan ini pada Pak Pimpinan anggaran DPD RI pada tahun 2020 yang kalau kemarin Rp 1.087.000.000.000, tahun 2020 kami memperoleh anggaran Rp 932 miliar terdapat penurunan anggaran sebesar 32,4%. Dari Rp 932 miliar yang kami peroleh sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam sidang kabinet terbatas bahwa Bapak Presiden memandang perlu melakukan *refocusing* anggaran atau yang dikenal dengan penyesuaian atau pemangkasan anggaran. Maka berdasarkan surat Menteri Keuangan per tanggal 15 langkah-langkah penyesuaian dilakukan maka penyesuaian atau penghematan terdapat *refocusing* sebesar Rp 32.284.000.000 sekian. Dengan demikian dari 932 terdapat pemotongan menjadi 899 sebagai bukti keseriusan pemerintah berpihakan kepada covid tahun 2020. Maka penurunan anggaran pada DPD RI menjadi 899. Sampai dengan 22 Juni dapat kami laporkan *progres* penyerapan, *progres* penyerapan pada 22 Juni telah direalisasikan sebesar Rp 368 miliar atau setidaknya *equivalent* dengan 41,45% penyerapan anggaran pada 22 Juni pada DPD RI di tahun 2020. Dengan perincian masing-masing satker pada satker Dewan Kelembagaan DPD RI terdapat 40,49 sedangkan satker Setjen 42,46 artinya rata-rata 41,45%.

Kami harus bekerja keras untuk melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran sampai dengan setidaknya nanti per tanggal 15 atau 20 Desember 2020 dari sisa anggaran yang tersedia. Selanjutnya ada pun capaian adalah pada satker Dewan sebagaimana terlampir dan seterusnya sampai satker Setjen dan seterusnya. Ada pun hasil produk yang dapat kami hasilkan sampai hari ini bahwa terdapat 5 materi produk legislasi berupa pandangan atau pendapat atas RUU dan pengawasan DPD RI atas undang-undang dengan rincian pandangan atau pendapat atas RUU sebesar 2 rancangan Undang-Undang sedangkan hasil pengawasan DPD RI atas Undang-Undang terdapat 3 materi atau semua berjumlah 5 mater. Kalau tadi tahun 2019 Bapak Pimpinan kemudian tahun 2020 kami laporkan kami akan menyampaikan usulan dan seterusnya pada pagu tahun anggaran 2021. Pagu indikatif yang kami terima berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Manteri PPN Bappenas per tanggal 8 Mei terdapat nomenklatur baru program.

Bahwa dalam surat dimaksud terdapat perubahan nomenklatur nama program, yang pertama program dukungan manajemen dan kemudian program penyelenggaraan Lembaga Legislatif atas alat kelengkapan dan ini sudah diputuskan dalam bersama antara pemerintah dalam pemerintah, antara Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas. Maka pagu indikatif yang kami terima dalam SBPI rancangannya mohon maaf, pagu indikatif mohon maaf adalah untuk tahun 2021 pagu indikatif Rp 934.578.000.000 sekian

sedikit terdapat kenaikan 0,24%. Jadi kalau kemarin kami 932 kemudian terkena pemangkasan dan seterusnya sekarang 934 terdapat kenaikan 0,24 tetapi jauh berbeda dari apa yang kami terima pada tahun 2018 yang lalu. Dengan hasil pada trilateral meeting program dukungan manajemen baik yang sifatnya anggaran operasional dan operasional pada program dukungan manajemen sebesar Rp 227 miliar sekian. Kemudian program penyelenggaraan Lembaga Legislatif atas alat kelengkapan 707 miliar sekian total pagu indikatif Rp 934.578.000.000. Ada pun satuan kerja yang akan dicapai untuk tahun 2021 sebesar Rp 707 miliar akan kami gunakan sebagai berikut mulai dari:

1. Kegiatan pelaksanaan dan pemasyarakatan keputusan DPD sebesar Rp 17 miliar sekian,
2. Penyelenggaraan pertemuan konsultasi DPD RI dengan Lembaga Negara Pemda, praktisi, LSM, mahasiswa, pakar ahli dan seterusnya, konsituen dan stakholder di daerah sebesar Rp 5 miliar sekian,
3. Penyelenggaraan fungsi legislatif pertimbangan pengawasan Rp 80 miliar sekian,
4. Penyelenggaraan fungsi legislasi pertimbangan dan pengawasan Rp 382,
5. Pelaksanaan kegiatan Anggota di daerah pemilihan sampai pengkajian aspirasi masyarakat sebesar Rp 2.310.000.000 dan seterusnya,
6. Perancangan Perundang-Undangan Rp 3 miliar sekian,
7. Kemudian pengelolaan keuangan keanggotaan DPD RI dan operasional persidangan rapat-rapat sebesar Rp 215 miliar dan seterusnya,

Sedangkan pada dukungan manajemen angka pada pagu indikatif ada Rp 227 miliar yang kita akan gunakan untuk penatausahaan organisasi dan tata laksana keanggotaan, pengembangan SDM dan advokasi hukum sebesar Rp 4.912.000.000, perencanaan dan pengelolaan keuangan ini terbesar adalah gaji pegawai tunjangan dan seterusnya sebesar Rp 134.000.000.00, pengelolaan sistem teknologi informasi sebesar Rp 10 miliar dan seterusnya sewa internet dan seterusnya, penyelenggaraan keprotokolan hubungan masyarakat dan media Rp 11 miliar, penyelenggaraan pelayanan umum sarana dan prasarana DPD RI Rp 47 miliar, penyelenggaraan pengawasan internal Rp 734 juta dan dukungan teknis administratif dan keahlian di kantor DPD RI di daerah pemilihan sebesar Rp 18.371.000.000 dan seterusnya. Dari 934 itu pada pagu indikatif. Izinkan kami Bapak Pimpinan untuk menyampaikan usulan tambahan anggaran DPD RI tahun 2021. Bahwa Sekretaris Jenderal melalui surat nomor sekian tanggal 2 Juni perihal usulan tambahan anggaran yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas dan seterusnya.

Menyampaikan bahwa pagu indikatif DPD RI yang ditetapkan bersama diantara tadi yang sudah kami laporkan bahwa belanja pagu indikatif untuk tahun 2021 Rp 934 miliar. Namun kami memandang dan setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan dan para Pimpinan alat kelengkapan bahwa hal ini masih belum memenuhi kebutuhan sebagaimana yang kita harapkan dengan berbagai dinamika problematika dan tantangan yang harus kita jawab guna bagaimana menyerap semua dinamika dan aspirasi masyarakat di daerah. Sebagaimana usulan dan kami mengusulkan waktu itu.

KETUA RAPAT/F.PDI-P (TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.):

Mohon maaf kalau bisa dipersingkat Pak sudah 20 menit.

SETJEN DPD RI (Dr. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M):

Baik.

KETUA RAPAT:

Kalau bisa Bapak/Ibu Anggota Komisi III setuju kita sepakati per Lembaga Negara 15 menit. Karena 15 menit kali 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah hampir 1 jam Pak. Kita sepakati

(RAPAT: SETUJU)

Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman Hery rapat ini maksimum berakhir pukul 17.00 WIB. Saya juga baru datang ditodong untuk memimpin rapat ini karena perintah saya laksanakan. Silakan Pak singkat-singkat saja karena semuanya sudah ada ini. Ini semuanya Pak Syarifudin Suding sudah membaca tinggal dia banyak buat bertanya ini mungkin dia pertanyaannya 15 menit nanti Pak Suding ini.

SETJEN DPD RI (Dr. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M):

Baik bapak izin Bapak Pimpinan kami melanjutkan kami akan persingkat.

Jadi kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.326.000.000.000 dengan rincian sebagaimana terlampir sudah ada mulai dari kegiatan nomor satu pelaksanaan dan pemasyarakatan keputusan DPD RI sampai penyelenggaraan dukungan teknis administratif. Jadi total yang akan kami laksanakan pada satker Dewan maupun satker pada dukungan manajemen sebesar Rp 3,2 triliun. Demikianlah beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

Silakan Setjen MPR RI 15 menit juga Pak ya.

SETJEN MPR RI (Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan Komisi DPR RI,
Bapak-Bapak Anggota Komisi III yang saya hormati dan saya muliakan,

Wakil khusus juga hadir Anggota Komisi III tetapi juga Pimpinan MPR RI hadir ada

F.PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Di Komisi III ini ada 4 orang Pimpinan MPR RI yang menjadi Anggota Komisi III.

KETUA RAPAT:

Yang hadir hanya Pak Arsul hari ini.
Silakan Pak lanjut Pak.

SETJEN MPR RI (Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H):

Baik Pak lanjut Pak.

Kami akan melaporkan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2020 sebagaimana dan tahun 2021 sebagaimana yang telah menjadi agenda kita pada hari ini. Yang pertama bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan RI pada tanggal 26 September 2019 alokasi anggaran MPR RI adalah sebesar Rp 603.670.269.000. Untuk membiayai program pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI sebesar Rp 455 miliar sekian dan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah sebesar Rp 148 miliar sekian dan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 terkait dengan perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 dalam rangka penanganan pandemi covid-19 MPR RI mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 27.531.087.000. Sehingga anggaran yang semula Rp 603 miliar sekian kemudian menurun menjadi Rp 576.139.182.000.

Anggaran tersebut untuk membiayai dua program yang pertama adalah program pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI dan alat kelengkapannya sebesar Rp 427 miliar sekian, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 148 miliar sekian. Kami melaporkan bahwa sampai dengan 22 Juni 2020 realisasi anggaran MPR RI adalah sebesar Rp 216 miliar sekian 37,64% dari anggaran alokasi yang diberikan. Yang pertama adalah realisasi pada pelaksanaan tugas konstitusional MPR RI sebesar Rp 165 miliar sekian dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 51 miliar sekian. Kemudian untuk pagu indikatif pada tahun 2021 kami pada tahun 2020 mengusulkan anggaran sebesar Rp 1.367.556.340.000 sekian untuk membiayai dua program sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Setjen DPD RI kita mengalami perubahan nomenklatur seperti juga di MPR RI yaitu program penyelenggaraan legislatif dan alat kelengkapan sebesar 1.141.000.000.000 sekian dan program dukungan manajemen sebesar Rp 226.345.000.000 sekian dan berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas kami memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 635.499.000.000 sekian.

Untuk membiayai program penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp 472 miliar sekian dan program dukungan manajemen sebesar Rp 162 miliar sekian. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengajukan usul tambahan anggaran setelah tentu melalui mekanisme rapat-rapat di internal MPR RI Badan Anggaran dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan MPR RI adalah mengusulkan anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp 732 miliar sekian dan untuk membiayai dua program yaitu program penyelenggaraan legislatif dan alat kelengkapannya yang diantaranya adalah untuk pembiayaan pelaksanaan tugas Pimpinan MPR RI, pelaksanaan kegiatan publikasi peliputan, pelaksanaan sosialisasi 4 pilar MPR, pengkajian kemajelisan, pengelolaan administrasi keuangan MPR RI dan penganggaran MPR RI. Juga untuk dukungan manajemen sebesar Rp 63 miliar sekian untuk membiayai kegiatan reformasi birokrasi dan restrukturisasi organisasi, penggantian plafon gedung Nusantara V, renovasi ruang Fraksi kelompok dan alat kelengkapan di gedung Nusantara IV dan kegiatan-kegiatan lainnya antara lainnya juga untuk renovasi ruang perpustakaan, rumah dinas Pimpinan MPR RI.

Renovasi ruang-ruang kerja Sekretariat Jenderal dan juga renovasi sarana prasarana lainnya yang ada di gedung Barana. Saya kira itu saya sampaikan dalam waktu yang singkat Pimpinan dan kami sudah sampaikan secara lengkap yang ada dalam RKA-KL tahun 2020 juga rincian anggaran di tahun 2021.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

Kita ke paling ujung dulu nanti penutupnya Mahkamah Agung gongnya.

Silakan Setjen KY.

SETJEN KY (Dr. Ir. TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT, MT., ME., MM., M.IP):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Sekretaris MA dan para Setjen,

Bapak Pimpinan pertama-tama kami ingin melaporkan sesuai agenda kita dengan agenda pembahasan yang pertama pagu indikatif Komisi Yudisial 2021, kemudian yang kedua *ouput* prioritas Komisi Yudisial tahun 2021, program kegiatan tahun 2021 dan usulan tambahan anggaran tahun 2021 serta tambahannya adalah realisasi anggaran 2020 karena banyak hal-hal

mendesak yang perlu kami sampaikan di tahun 2020 yang berjalan ini. Yang pertama untuk pagu indikatif Komisi Yudisial sebelum kesana kita akan menyampaikan. Saya mohon izin menyampaikan kerangka pemikiran RPJMN yang pada prinsipnya pada akhirnya kami mengacu kesana untuk peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik dan peningkatan teknologi farmasi dalam penguasaan hakim itu diamanahkan dan untuk pertama kalinya di RPJMN tahun 2020 – 2024 *output* Komisi Yudisial terkait dengan dari 4 agenda terkait dengan agenda 2 dan agenda 4 yaitu peningkatan integritas dan pengawasan hakim dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat itu dijadikan indikator secara nasional dan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan PPN Bappenas S-376/MK.02/2020 tanggal 8 Mei 2020 Komisi Yudisial mendapatkan pagu indikatif pada tahun 2021 sebesar Rp 109.425.617.000.

Dengan rincian kita memfokuskan pada dua program yaitu dukungan manajemen senilai Rp 93.743.317.000. Disini itu kami sampaikan belanja tetapnya atau ...(suara tidak jelas) mencapai Rp 84 miliar itu terdiri dari belanja operasional pegawai mencapai Rp 42 miliar dan belanja operasional barang, pemeliharaan gedung, mobil dan peralatan kurang lebih Rp 41,8 miliar dan program penegakan integritas hakim Rp 15.677.300.000 total Rp 109.425.617.000. Ada pun *ouput* prioritas Komisi Yudisial tahun 2021 yaitu penegakan hukum nasional mengamanahkan pengembangan indeks integritas hakim targetnya pada tahun 2021 7,04 sedangkan tahun lalu 6,59 dan tahun yang berjalan ini targetnya 6,72. Yang kedua penguatan dan integrasi database rekan jejak hakim targetnya di tahun 2021 75% dan yang terakhir pelatihan ...(suara tidak jelas) serta teknis hukum peradilan minimal melibatkan 20% hakim. Rencana program kegiatan tahun 2021. Program penegakan integritas hakim terdiri dari 3 kegiatan yang pertama seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, advokasi dan peningkatan kapasitas hakim target *outputnya* ...(suara tidak jelas) 9001 tahun 2015 senilai Rp 5.892.565.000.

Kemudian kegiatan yang kedua penanganan laporan masyarakat dari penerimaan laporan masyarakat sampai dengan keluarnya putusan dengan nilai pagu anggaran Rp 6.588.873.000 dan kegiatan ketiga yaitu penyelenggaraan investigasi hakim targetnya 50% presentase hasil investigasi akan ditindak lanjuti dengan pagu Rp 3.195.862.000 sehingga total untuk program penegakan integritas hakim Rp 15.677.000.000. Sedangkan program kedua yaitu program dukungan manajemen terdiri dari 3 kegiatan yang pertama penyelenggaraan dan pengelolaan penghubung. Kami ada 12 kantor penghubung di 12 provinsi, kegiatan kerja sama keuangan, perlengkapan rumah tangga, tata usaha dan pengembangan SDM kurang lebih Rp 84,6 miliar. Kegiatan kedua penyelenggaraan layanan informasi kepada publik Rp 5 miliar dan kegiatan ketiga penyelenggaraan perencanaan hukum dan kepatuhan internal kurang Rp 3,988 miliar. Jadi secara keseluruhan total Rp 109.425.000.000.

Ada pun usulan tambahan anggaran tahun 2021 seperti di renstra yang kami usulkan sebetulnya di tahun 2021 kami di renstra kami mengharapkan bisa mencapai Rp 171.925.000.000 namun yang tersedia 109

sedangkan kebutuhannya kurang lebih Rp 164.536.000.000 itu terdiri kekurangannya yaitu dari dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya diharapkan ada kebutuhan tambahan anggaran itu Rp 36,8 miliar sehingga total kebutuhan anggaran di tahun 2021 untuk dukungan manajemen dan tugas teknis Rp 130,585 miliar dan di program rekrutmen advokasi dan peningkatan kapasitas pengawasan perilaku hakim kebutuhannya Rp 33.951.000.000 atau harapannya ada kebutuhan tambahan kurang lebih Rp 18.273.000.000 masing-masing terdiri dari 3 kegiatan. Mulai dari penyelenggaraan hampir sama kegiatan-kegiatannya hanya kebutuhan anggarannya pagu yang agak berbeda.

Kami sangat berharap ada perhatian khusus dari Pimpinan dan Anggota Komisi III dan kami pun disini akan melaporkan realisasi anggaran tahun 2020. Sampai tanggal 23 Juni 2020 pagu anggaran dari total pagu anggaran tahun 2020 senilai Rp 80,196 miliar, penyerapan kurang lebih 42,97% terdiri dari dukungan manajemen 43,54% dan program penegakan integritas hakim 37,07%.
Pimpinan yang terhormat,

Terakhir kami mohon menjadi perhatian yang mulia Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI. Yang pertama anggaran program teknis yaitu program penegakan integritas hakim di tahun 2020 ini itu dua Biro satu pusat hanya tinggal 4,49 miliar rincian kegiatan ada di halaman 14 di materi yang dibagikan. Salah satu tugas utama Komisi Yudisial adalah penyelenggaraan seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung. Berdasarkan surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non yudisial tanggal 30 April perihal pengisian kekosongan jabatan Hakim Agung terdapat kekurangan sebanyak 8 orang calon Hakim Agung dan 8 orang Hakim Ad Hoc sehingga totalnya ada 16 orang untuk tahun ini dan informasi yang kami terima usia hakim Ad Hoc enam-enamnya diatas usia diatas 70 tahun dan sudah bekerja dua periode sehingga walaupun dibeberapa waktu lalu kami bersepakat untuk menunda karena pandemi 6 bulan namun kesepakatan Pimpinan kami dan Pimpinan MA memajukan seleksi hakim yang diumumkan Insya Allah bulan Juli.

Sehingga yang tadinya sekenario untuk CH itu ada 4 tahap yang seyogyanya tadinya 3 tahap tahun ini dan satu tahap akhir di tahun 2021 dimajukan semua di tahun ini. Sehingga kami dengan perkiraan tersebut kami sudah Pimpinan sudah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk mohon dukungan seleksi CHA dan investigasi senilai Rp 7.485.000.000 yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Yang kedua pelayanan atas penanganan laporan dugaan KEPPH dari Januari sampai 31 Mei mencapai 888 laporan artinya walaupun covid laporan tetap banyak sekali pengaduan-pengaduan. Kemudian selama pandemi covid-19 kami melaksanakan dan menyelesaikan 64 berkas pada sidang panel dan 106 berkas pada sidang pleno dan usul penjatuhan sanksi sejumlah 21 orang hakim rinciannya bisa dilihat di halaman 18. Kami pun menerima permohonan pemantauan dari Januari sampai 31 Mei sebanyak 205 berkas. Jadi tahun 2020 ini banyak hal-hal yang memang sangat mendesak khususnya terkait dengan CHA. Barang kali itu harapan-harapan dari kami kurang lebihnya mohon maaf.

*Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Lanjut Pak Setjen MK.

SETJEN MK (M. GUNTUR HAMZAH):

Baik terima kasih.

Yang terhormat dan yang kami muliakan Pimpinan Komisi III,
Juga yang kami hormati dan kami muliakan para Anggota Komisi III dan juga
sama yang kami hormati para kolega Setjen yang hadir dan beserta jajaran,
Serta seluruh hadirin yang sama kami muliakan,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Mohon izin Pimpinan kami melaporkan terkait RKA-KL dan RKP Mahkamah Konstitusi tahun 2021. Berdasarkan surat bersama Menteri PPN dan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020 dan S-376 per tanggal 8 Mei 2020 pagu indikatif Mahkamah Konstitusi TA Tahun 2021 *alhamdulillah* sebesar Rp 266.765.223.000. anggaran sebesar Rp 266 miliar ini mencakup dua program pertama program penanganan perkara konstitusi sebesar Rp 106.176.903.000 atau equivalent dengan 40% dan yang kedua adalah anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 160.588.320.000 atau equivalent 60%. Terkait dengan anggaran Mahkamah Konstitusi dapat kami laporkan sebagai perbandingan anggaran sejak tahun 2016 – 2021 tahun 2016 sebesar Rp 341.935.866.000, tahun 2017 pagu anggaran sebesar Rp 312.368.954.000, tahun 2018 anggaran Mahkamah Konstitusi pagu anggaran sebesar Rp 360.652.908.000, tahun 2019 pagu Mahkamah Konstitusi sebesar Rp 539.645.401.000.

Pada tahun 2020 pagu awal Mahkamah Konstitusi sebesar Rp 246.215.842.000 lalu dilakukan *refocusing* berdasarkan program pemerintah *refocusing* dan juga penghematan dan juga pemotongan. Mahkamah Konstitusi mengalami dua kali penghematan sebesar yang pertama pemotongan pertama sebesar Rp 25.144.336.000 dan kemudian dilakukan yang kedua pemotongan kedua sebesar Rp 58.452.418.000 yang atau setara dengan 34% dari total anggaran Mahkamah Konstitusi sehingga sisa anggaran untuk TA 2020 sebesar Rp 187.768.424.000. Terkait dengan pagu anggaran ini tahun 2020 telah kami lakukan penyerapan untuk tahun sampai dengan bulan Juni sebesar 47%. Ada pun untuk tahun 2021 sebagaimana telah kami laporkan tadi sebesar Rp 266.765.223.000. Terkait dengan ini tahun 2021 karena ini merupakan pagu indikatif maka kami hendak mengusulkan usulan tambahan pagu indikatif Mahkamah Konstitusi mengajukan usulan tambahan anggaran pagu indikatif tahun 2021 pada

Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan dan kepada Menteri Bappenas PPN sebesar Rp 248.718.640.000. Dengan demikian *Insyah Allah* kalau sekiranya disetujui maka kami berharap total anggaran Mahkamah Konstitusi untuk tahun 2021 sebesar Rp 515.783.863.000.

Usulan tambahan pagu indikatif Mahkamah Konstitusi tahun 2021 sebesar Rp 288.718.640.000 ini mencakup dua program juga tentunya anggaran untuk penanganan perkara sebesar Rp 182.275.310.000 dan anggaran untuk tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 288.452.213.000 sehingga total sebagaimana kami telah sampaikan tadi sebesar Rp 515.783.863.000.

Adapun tambahan pagu indikatif untuk penanganan perkara ini kami alokasikan yang pertama tentu saja untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota mohon izin ini sampai saat ini di pagu indikatif belum tersedia anggaran untuk penanganan perkara pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota mengingat tahun 2020 akan dilaksanakan bulan Desember akan dilaksanakan pemilu Kadas serentak untuk 270 daerah dan tentu Mahkamah Konstitusi akan nanti menyelesaikan penanganan perkaranya pada bulan Januari 2021 sehingga terkait dengan ini, ini belum sama sekali teralokasi anggaran untuk penanganan perkara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Juga kami gunakan nanti untuk penanganan perkara pengujian Undang-Undang ...(suara tidak jelas) dan perkara lainnya. Serta tentu juga untuk kaitannya dengan dukungan pemilukada yang dalam kaitannya dengan pemilu serentak tahun 2020 Desember dan juga untuk kepentingan keperluan bimbingan teknis, hukum acara bagi partai politik, bagi penyelenggara pemilu dan juga bagi para calon dan juga tentu kepada masyarakat atau warga pada umumnya ini sebesar anggaran yang kami butuhkan sebesar Rp 182.275.310.000.

Sementara untuk tambahan pagu indikatif untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 66.443.330.000 yang mencakup kegiatan untuk revitalisasi data center pengadaan diarsi pusat data, pengadaan perlengkapan ruang sidang, pengadaan lift orang dan barang yang di Mahkamah Konstitusi sudah kondisinya kurang baik, rehabilitasi ruang serves *back up* data, renovasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penataan ruang kerja gedung Mahkamah Konstitusi, pembangunan bukan pembangunan tetapi ini adalah menghubungkan antara gedung Mahkamah Konstitusi yang saat ini di Medan Merdeka No 6 dan kami juga diberikan kesempatan untuk memanfaatkan Jl. Medan Merdeka No 7 dan juga untuk kegiatan internasional simposium dan intrenship dan recharging program dalam kerangka pengembangan atau peningkatan kualitas sumber data manusia dilingkungan Kepamitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian Pimpinan yang dapat kami laporkan mohon kiranya Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI dapat menyetujui usulan

tambahan anggaran Mahkamah Konstitusi tahun 2021 demi kelancaran pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi. Demikian
Terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terakhir Mahkamah Agung silakan Pak.

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG (H. ACHMAD SETYO
PUDJOHARSOYO, S.H., M.Hum):**

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati Pimpinan sidang,
Para Anggota DPR RI rekan-rekan sejawat dan para staf yang hadir di ruangan ini,

Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan anggaran yang ada di Mahkamah Agung kami hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja sehingga tidak sampai 15 menit sudah selesai karena sudah tercantum disini. Baik Pimpinan sidang dan segenap Bapak/Ibu Anggota Dewan kami perlu laporkan. Anggaran atau alokasi pagu anggaran Mahkamah Agung tahun 2020 sebesar Rp 10.597.927.977.000. Kemudian dari alokasi anggaran tahun 2020 berkenaan dengan adanya penyesuaian anggaran Mahkamah Agung terkait dengan covid-19 terkoreksi untuk penyesuaian Mahkamah Agung mendapatkan penyesuaian atau pengurangan anggaran sebanyak Rp 743.021.947.000. Dengan demikian pagu anggaran Mahkamah Agung yang semula adalah Rp 10 miliar 500 lebih menjadi maaf tadi 10 triliun menjadi 854.906.030.000 dan sampai saat ini telah terserap sampai dengan tanggal 22 Juni 2002 sebesar 40,29%. Kami juga perlu laporkan bahwa anggaran tersebut antara lain kami gunakan untuk kegiatan yang tersebut di dalam Eselon I masing-masing Badan Urusan Administrasi, Kepanitraan Dirjen Badan Peradilan Umum Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Badan Diklat Kumdil dan Badan Pengawasan.

Kami juga perlu sampaikan bahwa realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 per belanja masing-masing per jenis belanja adalah belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal semuanya telah tercantum di dalam uraian ini. Kemudian kami juga perlu laporkan bahwa ada 10 prioritas nasional tahun 2020 yang ada di Mahkamah Agung:

1. Replikasi dan implementasi SPPT TI,
2. Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung kemudahan berusaha,
3. Pos bantuan hukum,

4. Sidang di luar gedung pengadilan,
5. Pembebasan biaya perkara,
6. Penyusunan pedoman penyelesaian perkara berbasis keadilan restroatif,
7. Sidang terpadu,
8. Sertifikasi SPPS terpadu,
9. Kajian evaluasi dan urgensi penguatan Kelembagaan jurusita,
10. Pembangunan zona integritas,

Bapak/Ibu sekalian,

Juga kami perlu sampaikan disini bahwa capaian kerja Mahkamah Agung di tahun 2020 khususnya penanganan atau penyelesaian perkara dari tahun 2019 tersisa 217 masuk tahun 2020 ini 9.512 sehingga jumlah beban perkara yang ada di Mahkamah Agung tahun 2020 adalah 9.729. Putus tahun 2019 sampai saat ini 6.054 sehingga sisa saat ini adalah 3.675 perkara atau 62,22% yang ada di Mahkamah Agung. Sedangkan secara total untuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tun total keseluruhan penyelesaian perkara sampai dengan April 2020 adalah 73,46%.

Bapak/Ibu sekalian,

Kami juga perlu laporkan bahwa kegiatan Mahkamah Agung khususnya pembangunan gedung baru untuk Mahkamah Agung yang semula adalah 85 gedung pengadilan baru yang telah diresmikan tahun 2018. Kemudian 25 gedung kita ajukan untuk kegiatan tahun 2020 pembangunannya namun kemudian kondisi tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena terkoreksi karena adanya penyesuaian anggaran di Mahkamah Agung sebanyak 80% dari pembangunan gedung Mahkamah Agung. Sehingga kami juga perlu laporkan bahwa ini akan berkaitan dengan kondisi pelaksanaan pembangunan di tahun 2021. Oleh karena itu maka kami perlu sampaikan pagu indikatif anggaran Mahkamah Agung di tahun 2021 sesuai dengan surat keputusan bersama antara Bappenas dan Kementerian Keuangan tanggal 8 Mei 2020 untuk pagu indikatif belanja Mahkamah Agung di tahun 2021 adalah Rp 10.664.840.386.000 yang terdiri dari program dukungan manajemen sebanyak Rp 10.241.274.066.00, kemudian program penegakan dan pelayanan hukum total adalah Rp 403.573.320.000 sehingga total keseluruhannya adalah Rp 10.644.847.386.000.

Ada pun prioritas nasional dan program kelembagaan tahun 2020 Mahkamah Agung mengimplementasi kegiatan prioritas nasional masing-masing peningkatan fungsi SPPT TI di pengadilan, kemudian pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan atau (e-court), kemudian pos bantuan hukum, sidang perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar pengadilan, perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara, bimbingan teknis dan penanganan perkara berbasis keadilan restoratif di Mahkamah Agung, sidang terpadu, sertifikasi hakim niaga, sertifikasi hakim mediator, diklat lingkungan terpadu pada Mahkamah Agung, sertifikasi SPPA terpadu, penyusunan grand design penguatan kelembagaan jurusita, pengembangan kebijakan Mahkamah Agung terkait mekanisme pemeriksaan sidang hak uji materil, pembangunan zona integritas dan terakhir tadi

pembangunan zona integritas. Kemudian berkenaan dengan hal tersebut maka Mahkamah Agung mengusulkan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 2020 perihal usulan anggaran Mahkamah Agung 2021 yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Mahkamah Agung mengusulkan kebutuhan anggaran sebanyak Rp 13.800.181.460.000. Namun sesuai surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Nasional dan Kementerian Keuangan tanggal 8 Mei 2020 pagu indikatif belanja KL tahun 2021 Mahkamah Agung mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 10.644.840.386.000. Setelah dilakukan evaluasi sesuai skala prioritas kebutuhan Mahkamah Agung tahun 2021 dibutuhkan anggaran sebesar Rp 11.580.907.633.000 sehingga terdapat kekurangan Rp 936.060.247.000. Kebutuhan tambahan anggaran tersebut dimaksudkan karena pada tahun 2018 yang telah diresmikan adanya 85 pengadilan baru dimana sangat dibutuhkan adanya dukungan sarana dan prasarana pembangunan gedung, kantor dan dukungan implementasi pengadilan elektronik dan peningkatan pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan maka di tahun 2020 tersebut dibutuhkan anggaran sebagaimana yang telah kami sampaikan dan tahun 2020 yang direncanakan dilakukan pembangunan 25 gedung pengadilan baru namun karena adanya penyesuaian postur anggaran untuk covid-19 maka dilakukan pemotongan anggaran 80% dari pembangunan 25 gedung kantor dimaksud sehingga anggaran pembangunan gedung peradilan tahun 2021 digunakan untuk memenuhi pembangunan gedung kantor pengadilan yang tertunda.

Disamping hal-hal tersebut kami juga perlu laporkan bahwa terkait dengan pemenuhan fasilitas hakim Mahkamah Agung telah melakukan renovasi rumah dinas sebanyak 140 unit atau 11.467 m² pemeliharaan rumah dinas hakim sebanyak 432.835 m², transportasi hakim dan sewa rumah dinas sejumlah keseluruhannya adalah 331 miliar 237 378 juta 740 ribu rupiah. Yang saat ini masih dalam *progres* adalah pemenuhan jaminan kesehatan yang sampai saat ini bagi hakim masih belum mendapatkan jaminan kesehatan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu kami mohon dukungan DPR RI agar menyangkut masalah jaminan kesehatan, jaminan keamanan sebagaimana yang diamanahkan dalam PP 94 Tahun 2012 akan mendapatkan dukungan dari DPR RI untuk bisa terwujud bersama-sama. Kemudian juga Mahkamah Agung saat ini juga sedang menjajaki bersama dengan Komisi Yudisial untuk membangun kerja sama sedang membangun MoU terkait dengan menyangkut masalah kesejahteraan hakim dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan penandatanganan MoU antara Kesetjengan, KY dan Sekretaris Mahkamah Agung. Demikian

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

Janjinya Pak Pudjohni tidak sampai 15 menit ternyata lebih dari 3 menit persis seperti orang hukum.

Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang terhormat,

Selesai 6 Lembaga Negara menyampaikan paparannya 1, 2, 3, 4, 5. Kami persilakan Fraksi pertama yang terbesar pemenang pemilu Fraksi PDI-Perjuangan Pak Nurdin
Silakan.

F.PDI-P (Drs. M. NURDIN, M.M):

Baik terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan rekan-rekan Komisi III yang saya hormati,
Rekan-rekan mitra kerja para Setjen dari KY, MK, MA, MPR dan DPD RI dan jajarannya,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam kaitan dengan masalah anggaran Pak mohon tadi juga sudah saya dengar serapan anggaran tahun sebelumnya. Itu yang bisa melihat bahwa nanti apakah anggaran yang sudah ada itu terserap berapa persen sehingga berikutnya kalau minta untuk yang berikutnya juga itu bisa masuk di akalah begitu. Saya ke DPD RI dulu Pak jadi bapak dapat anggaran 930 miliar tetapi usulan tambahannya 2 triliun, ini buat kami agak kaget juga begitu. Selama tahun lalu itu kemudian tahun yang sekarang berjalan kedepan itu sebetulnya DPD RI mau menyerahkan apa dalam tahun kedepan itu sehingga memberikan uang melaporkan 3 triliun. Nah itu mungkin mohon dalam kaitan ini ada realistislah Pak termasuk yang memperhatikan keuangan negara. Jadi memang kalau bisa nanti kita melihat lagi pada prinsipnya kami Komisi III Pak mendukung keinginan-keinginan dari rekan-rekan mitra kerja tetapi juga tolong kita melihat situasi negara dan keuangan. Jadi di Banggar besar tidak terlalu heran juga begitu kalau misalnya mendapat anggaran 900 mintanya 2 triliun dan mohon juga dalam kaitan dengan pengajuan ini memperhatikan hasil pemeriksaan BPK RI.

Jadi saya melihat disini bapak minta lagi penyelenggaraan keprotokolan pelayanan umum sarana dan prasarana yang sampai 1 triliun tetapi dari pemeriksaan BPK RI di semester yang lalu masalah kegiatan keprotokolan itu masih tidak di dukunga pertanggung jawaban yang memadai. Jadi mohon ini dikoreksi Pak sehingga ada kepercayaan buat kami untuk menyetujui tambahan-tambahan itu tetapi kalau pertanggung jawabnya tidak memadai agak repot juga mengusulkannya. Demikian juga untuk MPR RI. Jadi anggaran tambahan mengajukan usulan anggaran sebesar 1,3 triliun itu juga bisa dilihat seperti apa yang saya katakan tadi tahun depan itu mau mengerjakan apa saja. Kemudian kalau misalnya ada indeks, sehingga berapa kegiatan kali indeks disamping juga tetap memperhatikan apa hasil temuan dari BPK RI karena masih banyak yang pertanggung jawabannya tidak sesuai dengan ketentuan. Demikian saya singkat-singkat saja Pak. Kemudian rekan dari KY Pak.

KY juga sama dalam kaitan dengan permintaan ini mohon program-program yang akan dikerjakan di tahun 2021 itu agak rinci Pak sehingga kegiatan itu dengan nanti biaya-biaya itu bisa dihitung sehingga tidak terlalu jauh nanti apa yang di dapat dari pemerintah untuk penyelenggaraannya. Nah ini juga sama saya mohon Pak dalam kaitan dengan ini pemeriksaan BPK RI itu diperhatikan karena kalau dilihat dari hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2019 belanja barang operasional keperluan perkantoran sebesar 2 miliar itu dirasakan tidak sesuai dengan peruntukannya jadi ini mohon diperhatikan Pak. Jadi dikasih uang tetapi peruntukannya jadi beda dengan rencananya ini mohon diperhatikan. Itu saja terakhir kemudian MK dulu Pak.

MK sama juga mungkin nanti dengan perkiraan-perkiraan yang akan tahun 2020- 2021 itu pun sama dengan. Mungkin penanganan perkara mestinya kan pakai indeks Pak kira-kira tahun depannya berapa perkara kira-kira sehingga dikalikan indeks ketemu angka. Nah jadi ini yang perlu dikatakan bahwa misalnya nanti pilkada 270 daerah itu kira-kira berapa si biasanya sehingga keluar angkanya menjadi memudahkan kita untuk menggoalkan atau pun mendorong mengajukan ke Banggar Besar. Ini pun sama dari temuan BPK RI Pak misalnya ...(suara tidak jelas) monitorum melakukan perjalanan dinas belum memadai, terus penyusunan pelaksanaan pelaporan anggaran belum sesuai standar sehingga mengakibatkan belanja barang 23 miliar dengan anggaran modal sebesar 13 miliar dirasakan tidak sesuai dengan peruntukan jadi mohon ini disetarakanlah. Nanti saya hasil BPK RI-Nya saya serahkan ke bapak-bapak. Demikian juga di Mahkamah Agung saya kira sama. Jadi jaminan kesehatan atau pun kesejahteraan hakim yang diperlukan itu berapa si Pak jadi ada indeksnya mungkin.

Saya ingat pada waktu zaman terdahululah tunjangan kinerja setelah Menteri Keuangan kan Mahkamah Agung tetapi di Mahkamah Agung tidak bisa terserap karena nomenklatur dan sebagainya itu belum disusun dengan baik sehingga angka-angkanya juga tidak jelas dari tiap-tiap eselon. Jadi mohon ini supaya disusun ulang tetapi pada dasarnya apa yang mungkin kita nanti setelah ini kan kita bicarakan di internal kami mudah-mudahan bisa apa yang diharapkan bapak-bapak bisa kami penuhi tetapi bagaimana pun juga ada kewajaran dalam pengajuan-pengajuan. Saya kira demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nurdin dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Kami kebawah ya kebawah Fraksi Partai Amanat Nasional. Kebawah PPP Pak Arsul sory Pak Suding.

F.PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya tetap khusnuzon sama Pak Ketua, bukan karena sentimen sama PPP.

Terima kasih kepada para Setjen dari mitra Komisi III DPD RI, MPR RI, MA, MK dan KY.

Saya minta izin dulu sama Pak Setjen MPR RI ini saya disini sebagai poksi PPP di Komisi III. Nah saya ingin mulai dari KY dulu mohon izin ini Pak Ketua kalau diomongin di rumah urusannya jadi panjang jadi lebih bagus di Komisi III saja. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh kapoksi PDI-Perjuangan Pak Komjen Nurdin. Saya kira para mitra dalam rangka tata kelola anggaran yang lebih baik perlu memperhatikan temuan-temuan BPK RI. Meskipun saya melihat banyak juga yang kecil-kecil tetapi ya tetap harus diperhatikan. Nah khusus untuk KY ini Pak anggaran bapak ini kecil tetapi yang bermasalah dari laporan BPK RI cukup gede juga begitu loh, anggarannya kecil tetapi yang bermasalah besar. Contoh kalau saya baca hasil pemeriksaan BPK RI semester pertama tahun 2019. Ini disini disebutkan ini memang mungkin zaman bapak belum menjadi Setjen tetapi kan sekarang Setjennya bapak harus bapak beresin ini. Belanja barang operasional keperluan perkantoran sebesar Rp 2.082.752.712 direalisasikan tidak sesuai peruntukannya.

Kemudian aset tetap peralatan dan mesin sebanyak 225NUP belum diketahui keberadaannya serta aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan yang ini besarnya adalah 959.904.446 ini lumayan besar juga begitu ya ukuran untuk jumlah total anggaran bapak yang tidak begitu besar. Nah jadi saya ingin mohon perhatian ini Pak Setjen KY agar tata kelola anggarannya ini dibereskan walaupun bapak orang baru galakan sedikitlah sama jajarannya begitu ya. Jangan sama komisionernya nanti urusannya panjang kalau sama komisionernya. Jadi itu untuk KY catatan saya karena apa karena kalau bapak banyak temuannya barang sedikit tetapi temuannya nilainya besar susah juga kita misalnya memberikan ruang anggaran yang lebih besar. Nah yang kedua untuk MPR RI ini Pak Setjen saya kira saya terus terang konsen dengan penyerapan MPR RI yang disetengah tahun pertama ini masih 40an ya kurang malah. Nah ini kan terkait dengan salah satu bidang tugas dari para Anggota MPR RI yaitu sosialisasi.

Nah dalam zaman pandemi covid ini kan memang kalau sosialisasinya harus seperti zaman normal kan susah. Nah ini mohon juga disampaikan kepada seluruh Anggota MPR RI ya mungkin diruangan Komisi III ini supaya nanti bisa menyebar ke Fraksi-Fraksi lain, kemudahan-kemudahan yang diberikan. Nah ini untuk teman-teman ketahui anggaran MPR RI tahun 2020 itu dibandingkan tahun 2019 itu sudah terpotong banyak sekali 35% kalau tidak salah. Ini belum ada covid sudah dipotong ini sama Kementerian Keuangan. Nah ini sedang kita upayakan tahun 2020 ini untuk dapat yang lain jangan ngiri Pak ya saya sedang mengupayakan diri sendiri begitu ya, itu dapat tambahan tetapi kalau kita yang ada saja 600 sekian miliar itu tidak terserap dengan baik pasti tidak dikasih tambahannya dan tahun depan susah juga untuk minta kenaikan tetapi disini lain Pak Setjen harus juga menyampaikan kemudahan-kemudahan prinsipnya agar kita tidak melanggar

aturan SOP tetapi juga bisa terserap dengan baik yang terkait dengan kepentingan para Anggota saya kira itu.

MK Pak Setjen MK saya kira sama secara umum saya mengapresiasi Pak Setjen MK sudah menyampaikan bukunya tetapi apakah kepada teman-teman Komisi III sudah disampaikan semua jadi ada, belum. Nah itu tolong kalau bisa diberikan Pak Setjen MK karena itu buku bagus jadi anotasi terhadap Undang-Undang yang sudah pasalnya dibatalkan atau diberi pemaknaan konstitusional. Ini penting bagi Komisi III soalnya jadi kami mohon itu dibagikan kepada seluruh Anggota Komisi III ada 10 buku kalau tidak salah masing-masing. DPD RI saya tidak berani komentarnya jadi MA. Kalau MA Pak Setjen ini kan kita saya kira nanti sama bahannya menyuarakan suara dari teman-teman hakim dan jajaran pengadilan di daerah. Jadi mohon karena kita tidak masuk kepada satuan tiga maka kalau bisa Pak Setjen Pak Pudjoh ini benar-benar memperhatikan. Jadi yang di Merdeka Utara itu tidak usah terlalu mewah-mewah lagi Pak. Kemewahan di Merdeka Utara mestinya sudah harus berubah apa lagi ini ada Ketua MA yang barulah ya.

Jadi untuk memenuhi tradisi yang baru yang lebih banyak memperhatikan jajaran peradilan di daerah itu jauh lebih penting. Kita itu ngenes Pak kalau melihat berkunjung ke Polda, ke Kejati, Pengadilan Tinggi pasti paling jelek ruangnya Ketua Pengadilan Tinggi itu kan ngelus dada juga kita tetapi ruangan di Mahkamah Agung Ketua Mahkamah Agung satu lantai sendiri ruangnya itu ruangan ya ini mohon maaf. Pimpinan Lembaga Negara yang paling mewah itu adalah ruangan Ketua Mahkamah Agung. Nah jadi ruangan Ketua DPR RI atau Ketua MPR RI jauh lebih tidak semewah Ketua Mahkamah Agung. Nah saya kira ini saatnya mumpung Ketua Mahkamah Agung baru benar-benar untuk lebih memperhatikan teman-teman pengadilan yang di daerah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Saya kira catatan-catatan saya umum saja itu Pak Pudjoh dan mudah-mudahan dalam satuan tiganya itu nampak. Kami akan lihat kan bapak nanti setelah ini disahkan dalam 30 hari kan wajib menyerahkan satuan tiganya kepada DPR RI nah itu nanti kami akan lihat.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Arsul Sani.

Intinya dua itu Pak KY dan MPR RI kalau KY tidak ngomong Pak Arsul Sani ini bisa dipunggungi tidurnya nanti. Berikutnya Fraksi Partai Golkar

F.PG (SUPRIANSA, S.H., M.H):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III,

Yang saya hormati seluruh mitra kerja Setjen KY, Setjen MK, Mahkamah Agung, MPR RI, DPD RI yang sama-sama saya hormati,

Saya mau mulai dari DPD RI sekaligus MPR RI. Saya mencoba membandingkan sedikit pagu anggarannya. DPD RI dari 2,3 triliun diusulkan menjadi 3,2 triliun menurut saya ini rasional dan saya kira ini bisa dipahami. Yang kurang-kurang saya pahami ini MPR RI-Nya dari 635 menjadi hanya kurang lebih 1,3 ini kurang sekali. Maksud saya jangan sampai karena kekurangan anggaran yang ada disitu sehingga rencana kita untuk mensosialisasikan 4 pilar ini dirubah dari 6 ke 2. Bisa ditambah lagi beberapa kali ini masukannya karena situasi mesti kita memang banyak-banyak turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan yang namanya 4 pilar itu karena menyangkut masalah kewaspadaan yang ada mulai dari bawah ini yang kita mau bangun. Menurut saya ini perlu kira-kira bukan karena ada Pak Arsul Sani oh ada Banggar ...(suara tidak jelas) Pak Ketua jadi bisa ini bisa di dengarkan langsung ini. Saya kira ini adalah salah satu ini. Yang kedua sudah disinggung sedikit tadi Pak Arsul bahwa saya kira Setjen MPR RI ini bisa berkordinasi dengan BPK RI menyangkut masalah bagaimana mempermudah laporan-laporan yang ada sehingga situasi covid-19 ini tidak menjadi penghalang pelaksanaan sejumlah kegiatan-kegiatan kita.

Kalau kemarin-kemarin misalnya 150 orang harus dikumpulin satu tempat ini kan setengah mati karena situasi pandemi saya kira bisa dirubah menjadi diberikan kepada masyarakat saya kira ini perlu kira-kira menjadi sebuah bahan komunikasi antara Setjen MPR RI dengan BPK RI supaya tidak menjadi sebuah persoalan hukum dikemudian hari. Kemudian Pak Setjen KY bersama dengan Setjen MK saya kira enggan juga saya mengomentari sebenarnya ini karena anggarannya kecil sekali ya. Jadi kalau toh saya akan mengomentari saya miris pada diri saya sendiri sudah kecil dikomentari lagi ini kira-kira begitu. Saya kira hanya supaya serapannya nanti lebih bagus saya kira perlu juga tetap ada komunikasi karena situasi pandemi memang situasi yang tidak pernah kita kira-kira bayangkan bisa terjadi sehingga saya melihat tidak ada serapan anggaran sampai 80% saya melihat ini itu dibawa semuanya saya kira menjadi perhatian kita. Khusus Sekretaris MA saya kira ini kita kan dalam situasi rapat-rapat begini biasanya sangat terbatas sekali bapak diberi waktu 15 menit.

Saya juga diberi waktu sangat terbatas oleh Pimpinan. Olehnya itu saya kira tidak menurunkan sebuah kewibawaan Mahkamah Agung jika sering-sering kita melakukan komunikasi dengan Komisi III. Terkesan sekali Mahkamah Agung ini menutup diri dengan Komisi III sehingga Komisi III juga serba salah bagaimana caranya untuk membangun komunikasi itu. Jangan kita bertemu pada saat pembahasan anggaran setelah itu kita tidak lagi akan pernah bertemu-bertemu. Nah saya kira tidak menghilangkan rasa independensi kita di Mahkamah Agung ini jika kita dalam waktu tertentu kita bisa membuka ruang komunikasi yang lebih bagus karena ini menyangkut masalah akhir sebuah harapan masyarakat Indonesia ada ditangan MA. Anggarannya saya melihat juga ini penambahannya juga cukup bagus saya kira saya tidak mengomentari deh anggarannya sama dengan MK dengan KY saya kira bapak-bapak semua ini selalu berpikir untuk kepentingan orang

banyak. Dari Fraksi Golkar saya kira hanya itu yang saya sampaikan Pak Ketua

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Supriansa.

Berikutnya dari Fraksi Partai Amanat Nasional

Yang terhormat Bapak H. Sarifudin Suding.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih.

Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi III,

Mitra kerja Komisi III yang saya hormati,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama saya mengawali dari DPD RI kalau melihat pagu anggaran DPD RI data yang ada dikita dari tahun 2017 sampai saat ini memang anggaran DPD RI ini belum pernah diatas angka 2 triliun paling mentok diangka 1.082.000.000.000 di tahun 2018. Memang juga agak aneh juga ketika misalnya pagu anggaran dari Kementerian 534.578.000.000 sekian lalu minta penambahan anggaran 2.326.000.000.000 lebih besar usulan tambahannya sehingga menjadi total 3.261.000.000.00. Kalau melihat anggaran dan program yang disampaikan oleh DPD RI memang saya kira dari nomenklatur yang penambahan anggaran ini maupun program dari pagu indikatif ini saya kira memang perlu ada perbaikan. Karena beberapa diksi yang digunakan seperti penambahan anggaran ini ada program penata usahaan organisasi dan tata laksana keanggotaan pengembangan SDM dan advokasi hukum. Sejak kapan DPD RI menjadi Lembaga katakanlah Lembaga Konsultan Hukum atau kah sebagai LSM dalam hal mengadvokasi. Karena advokasi hukum ini kan kita bicara masalah ledikasi dan ...(suara tidak jelas) sebenarnya ya.

Saya kira banyak hal disini penyelenggaraan keprotokolan hubungan masyarakat dan media banyak tidak sampai 25 miliar. Saya kira ini yang perlu dievaluasi ulang Pak Setjen karena beberapa catatan saya yang juga bersumber dari BPK RI terhadap DPD RI ini banyak temuan catatan-catatan hasil pemeriksaan BPK RI semester satu tahun 2019 yang dianggap bahwa DPD RI, BPK RI banyak menemukan adanya ketidak patuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada DPD RI pokok-pokok temuan ketidak patuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Banyak sekali belanja-belanja temuan BPK RI yang ada di DPD RI ini yang memang harus dipertanggung jawabkan. Belanja kegiatan protokoler sebesar 589 juta tidak di dukung pertanggung jawaban yang memadai, pembayaran honor output kegiatan sebesar 80 juta sekian tidak sesuai ketentuan sebesar 3.877.000.000 tidak sesuai dengan

tatib DPD RI. Ini ada catatannya Pak banyak ini anggaran-anggaran di DPD RI yang tidak bisa dipertanggung jawabkan di laporan BPK RI Pak.

Saya kira Pak Setjen DPD RI ketika mengusulkan anggaran atau penggunaan anggaran pagu definitif nantinya betul-betul disesuaikan dengan aturan-aturan dan ketentuan yang ada. Catatan saya buat DPD RI dilakukan diperbaiki kembali nomenklatur yang ada disini Pak supaya itu betul-betul meyakinkan kita bahwa ini adalah memang kebutuhan anggaran sesuai dengan program yang disampaikan. Karena itu yang saya sampaikan bahwa belum pernah anggaran DPD RI itu mencapai diangka dua. Ini langsung melonjak jadi ketiga sementara kita dalam kesulitan dibidang ekonomi dengan pandemi covid-19 ini. Nah untuk DPD RI lalu kemudian MPR RI saya kira memang anggaran MPR RI dengan pagu indikatif yang disampaikan Kementerian ada kurang lebih 635 miliar saat ini, lalu kemudian minta penambahan 732. Kalau dilihat dari pagu anggaran MPR RI sebelum ada penambahan Pimpinan MPR RI dari 5 menjadi 10 juga Anggota MPR RI yang bertambah Pak ...(suara tidak jelas) ini kan bertambah ini Anggota MPR, juga Pimpinan MPR bertambah saya kira memang sangat wajar kalau dilihat dari usulan tambahan yang disampaikan oleh Pimpinan MPR RI dalam kaitan menyangkut masalah kegiatan Pimpinan di MPR RI ada 10 Pimpinan MPR RI.

Nah untuk itu saya kira ini masuk logika kita bahwa MPR RI bisa kita berikan ruang untuk dilakukan penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan di Lembaga ini. Pada prinsipnya saya memberikan dukungan penuh terhadap MPR RI hanya memang ada juga catatan-catatan dari BPK RI menyangkut masalah. Ini perlu diperbaiki Pak Setjen jangan sampai menjadi temuan. Karena anggaran di MPR RI ini sifatnya lansem dan ada temuan BPK RI bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di MPR RI ini itu menemukan terdapat selisih. BPK RI mencatat adanya kegiatan di MPR RI yang bersamaan dengan kegiatan di DPR RI sebanyak 150 orang Anggota kan begitu. Jadi kadang bertabrakan kegiatan matriksnya kadang ini kegiatan MPR RI dengan kegiatan DPR RI ...(suara tidak jelas) bersamaan sehingga itu menjadi temuan. Nah saya kira MPR RI dari Kesetjenan meminta kepada Anggota supaya betul-betul diperhatikan ini jangan sampai melakukan kegiatan matriks sama antara kegiatan DPR RI dengan MPR RI dan ini jadi temuan harus dibalikin uangnya ini.

Jangan mengambil duitnya baru tidak melaksanakan kegiatan kan begitu itu kan fiktiv. Ini banyak ini BPK RI mencatat adanya kegiatan di MPR RI yang bersamaan dengan kegiatan di DPR RI sebanyak 150 orang Anggota sebesar 800 sekian juta rincian pada halaman (...) dan halaman (...) saya kira ini menjadi perhatian Pak ini jadi temuan dan nanti jadinya jatuhnya sama Anggota ini. Jadi kalau memang dilihat matriksnya bertepatan antara kegiatan MPR RI jangan diberikan kegiatan itu dari pada jadi temuan BPK RI. Itu catatan saya buat MPR RI tetapi usulan tambahan dari Banggar ini saya setuju karena juga terjadi penambahan di unsur Pimpinan dan Pimpinan banyak kegiatannya ya adakan konser dan sebagainya. Nah lalu kemudian Mahkamah Agung saya setuju apa yang disampaikan Pak Arsul Sani saya kira perlu di kita juga tidak bisa pungkiri Pak bahwa kawan-kawan kita di

daerah terkadang kita prihatin melihat kondisinya Pak. Kadang-kadang hakim pindah tugas harus kos ditempat tugasnya yang terkadang kita melihat kadang tidak layak ke kantor naik angkot dan sebagainya.

Ini seorang hakim Pak menyangkut harkat dan martabatnya begitu loh harus dijaga begitu loh. Sementara kalau kita melihat hakim-hakim agung penuh dengan kemewahan saya kira ini perlu di ini perlu hakim-hakim di daerah ini perlu ada perhatian Pak di pelosok-pelosok ini Pak. Jangan di Jakarta ini kita melihat kemewahan yang ada disana sementara hakim-hakim di daerah penuh dengan kesengsaraan Pak sehingga putusan-putusan mereka begitu mudah. Ini kan terkadang dari kehidupan itu sehingga terkadang mempengaruhi integritas Pak kan begitu itu harus dijaga Pak Setjen harus dijaga integritas hakim-hakim kita di daerah sebagai para pengadil untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Saya setuju yang disampaikan Pak Arsul penambahan anggaran yang disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung saya kira juga sangat rasional. Mahkamah Agung dari pagu indikatif 936 menjadi 11 triliun untuk dijadikan 11 triliun saya kira usulan penambahan anggaran ini sesuai dengan program yang diajukan dalam rangka penguatan Kelembagaan dukungan manajemen dan sebagainya.

Saya setuju Pak ya dukungan anggaran ini dalam rangka untuk memberikan layanan hukum yang betul-betul baik buat para pencari keadilan begitu pula Mahkamah Konstitusi catatan saya bagi Mahkamah Konstitusi saya setuju. Catatan saya buat Komisi Yudisial, Komisi Yudisial dengan anggaran dalam kaitan menyangkut masalah seleksi hakim disini cukup besar Pak tetapi terkadang yang diloloskan dari Komisi Yudisial itu ditolak oleh Komisi III semuanya.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf Pak. Pak Setjen KY.

F.PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Pak Setjen KY lagi catat apa. Catatan omongan saya atau catat apa. Ini dalam kaitan menyangkut masalah anggaran yang bapak-bapak usulkan tambahan disini. Saya kira ini dalam kaitan menyangkut masalah seleksi hakim. Karena tidak dipungkiri juga bahwa banyak suara-suara di sana pansel-pansel yang dibentuk di KY itu itu di transaksional. Orang-orang diloloskan disini itu itu transaksional. Jadi menurut saya betul-betul sangat selektif supaya ketika masuk di DPR RI ini karena DPR RI ini adalah Lembaga Politik Pak adalah orang-orang yang betul-betul memenuho kriteria baik dari sisi integritas, kapasitas dan sebagainya dan sebagainya begitu. Jangan asal karena ada transaksional disitu ya sudah diloloskan saja ke DPR RI itu. DPR RI padahal disini adalah Lembaga Politik. Jadi jangan mengharapakan bahwa DPR RI ini. Nah makannya berharap kan pansel di KY ini yang betul-betul sangat selektif meloloskan orang-orang yang betul-betul setengah dewalah untuk menjadi hakim kan begitu.

Jangan habis anggaran disini ini besar anggaran si hakim ini tetapi ternyata orang-orang yang diloloskan orang-orang yang tidak memiliki integritas yang baik. Saya kira itu.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Suding.

Berikutnya tetapi Setjen MK Pak jangan lupa bukunya Pak saya cek ke Sekretariat belum Pak. Disini semua hobi membaca buku Pak. Hobi baca buku hobi liar kening juga. Berikutnya dari Fraksi Gerindra Pak Romo.

Silakan Pak Romo.

F.P-GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya secara umum ingin kembali mengingatkan kepada seluruh mitra kerja terhadap hasil evaluasi atau pemeriksaan BPK RI. Saya kira ini menjadi sebuah rujukan baru kedepan agar program itu memang tepat anggaran dan tepat sasaran. Jangan pada pertanggung jawaban anggaran yang akan dibuat kedepan ini kita akan mendapat evaluasi yang sama dan kesalahan yang sama juga. Ini pesan kepada semua mitra kerja yang hadir pada hari ini. Kemudian terhadap semua usulan anggaran tambahan saya kira kami melihat memang sudah seharusnya ya melihat beban kerja yang semakin besar tetapi tentu harus diimbangi dengan yang tadi tepat anggaran dan tepat sasaran. Saya kira usulan tambahan itu tidak di karang-karang jugalah ya karena memang bapak-bapaklah yang paham tentang apa yang harus dikerjakan di unit kerja masing-masing. Kalau memang ada sedikit lucu juga di DPD RI anggaran aslinya itu tidak sampai separuh dari usulan anggaran tambahan. Saya kira ini memang perlu dievaluasi kembali.

Kemudian khusus untuk Mahkamah Agung. Saya di akhir penyampaian Pak Setjen tadi kan mendengar masih ada hak-hak hakim yang belum terpenuhi yaitu hak kesehatan, kemudian hak keamanan, perumahan. Saya kira kan regulasinya sudah ada PP-Nya sudah keluar kan tetapi kenapa tidak ada dalam usulan anggaran ini. Bahkan saya membaca diusulan tambahan anggaran pun itu tidak dimasukkan. Saya ingat dalam pertemuan sebelumnya kalau memang itu merupakan kebutuhan yang mendesak dan dari paparan kawan-kawan saya kira sangat mendesak. Ya bagaimana seorang hakim dengan rumah kos banyak kendaraan berhadapan dengan tokoh yang mempunyai anak buah luar biasa punya kekayaan luar biasa bersidang disebuah pengadilan. Saya kira kan memang butuh ada perlindungan terhadap hakim-hakim itu. Yang saya herankan kenapa itu tidak masuk dalam prioritas program bahkan tidak dimasukkan juga dalam usulan tambahan anggaran.

Artinya kalau pagu anggaran ini disetujui plus usulan tambahan anggaran disetujui ternyata Kesetjenan Mahkamah Agung belum juga berkeinginan untuk merealisasi apa yang sebenarnya menurut peraturan sudah menjadi hak para hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Jadi khusus untuk yang Mahkamah Agung ini Ketua kalau memang masih bisa dirubah usulan tambahan ini saya kira dirubah saja dan bila perlu ditambah paling tidak untuk tahap awal agar realisasi perlindungan terhadap kesehatan, keamanan dan perumahan itu walaupun belum sepenuhnya tetapi sudah dimulai. Karena saya mendengar keluhan itu sudah sejak lama semenjak PP dikeluarkan sampai hari ini belum pernah terealisasi tetapi belum pernah juga ada rencana untuk dianggarkan. Saya kira Pak Setjen masukan saja kita setuju sajalan karena itu memang merupakan hak dari hakim-hakim kita. Apalagi kami ke hampir seluruh daerah-daerah di Indonesia melihat keprihatinan itu.

Betul sangat berbeda dengan, kita masuk ke gedung Mahkamah Agung itu itu kalau tidak permisi Pak tidak bisa Pak. Kan apanya itu begini dia mesti kita tunjukan dulu sudah dipesan Setjen ini baru turun tetapi di daerah-daerah itu dari pinggir jalan kita bisa melihat hakim ini jadi memang kurang sebanding. Jadi saya mendukung pendapat kawan-kawan ya mengalirlah ke daerah-daerah dan tolonglah diusulkan tambahan anggaran ini sudah masuk itu Pak untuk perlindungan kesehatan, perlindungan keamanan dan juga perumahan para hakim-hakim kita itu secara khusus kepada Mahkamah Agung. Kemudian kepada MPR RI pada MPR RI juga ini kan pagu anggaran 635 miliar lebih dengan usulan tambahan 732 miliar lebih sehingga dicanangkan menjadi 1,3 triliun lebih kan begitu Pak ya saya kan termasuk Badan Kajian ini Badan Kajian MPR RI. Itu kalau pertemuan di Badan Kajian itu sudah ada ke khawatiran Pak bahwa kemungkinan mempertahankan jumlah pagu anggaran yang sama di tahun 2020 dengan 2021 pun juga akan sulit kalau memang kita tidak bisa melakukan serapan anggaran di tahun 2020 in.

Ini kita-kita ini semuanya semangat ini Pak melakukan serapan anggaran dan memang kita punya kewajiban tetapi kan kemudian terhalang karena covid. Sementara MPR RI informasinya Pak Arsul baru berani merubah alokasi anggaran itu kalau covid ini tidak selesai sampai Desember. Pertanyaannya kapan lagi itu program ini dieksekusi kalau keberanian MPR RI baru bisa merubah alokasi. Kan ini Pak Ketua kita tidak ada kunker padahal kan anggarannya itu besar sementara masyarakat sebenarnya kan butuh ini kita sambangi begitu. Kan bisa kita buat program tetapi jangan menunggu Desember dong menurut saya. Dibuatlah program-program yang kemudian mudah kita laksanakan. Tadi saya masih meneken untuk sosdampil itu masih diwajibkan 150 orang juga. Bagaimana saya bikin sosdampil mengumpulkan 150, ditegur kawan-kawan saya dong ini. Ini Romo tidak peduli covid katanya atau kalau memang (...) protokol kesehatan saya perlu menggunakan ruangan sebesar apa untuk 150 orang itu.

Tidak ada penjelasan bahwa itu bisa dilakukan secara virtual. Saya kira juga seperti program Asmas (Aspirasi Masyarakat) saya kira ini kan sangat penting memang kita lakukan di dalam tugas kita sebagai Anggota MPR RI tetapi pertanyaannya dalam asmas yang akan kita lakukan dimasa covid ini

saya yakin asmas yang paling penting itu adalah asmas sebagaimana agar masyarakat itu tidak kesulitan makan juga. Ya Pak Ketua ya seperti sosialisasi 4 pilar ini kayanya menjadi sangat penting ketika debat tentang RUU HIP begitu tinggi sebenarnya ini kan bisa kita bantu juga penjelasan kepada masyarakat kalau misalnya punya keberanian MPR RI menambah program 4 pilar dari misalnya 2 menjadi 4 tetapi saya kira itu dicepat. Karena saya mendengar (...) Kementerian Keuangan ini kalau anggaran ini tidak terserap jangan harap usulan tambahan ini akan direalisasi. Saya kira masyarakat sangat butuhlah ya sangat butuh kehadiran kita ke daerah atau virtual ya mungkin bentuknya yang perorang 110.000 itu bisa kita tambah begitu ya menjadi 250.000 kepada peserta-peserta itu sehingga serapan anggarannya logis dan itu kan tidak mengambil pos anggaran yang lain karena kita mengalokasikan dari dana yang tidak mungkin terpakai akibat covid itu. Saya kira harus ada keberanianlah dari Kesetjenan supaya serapan anggaran itu bisa terpenuhi dan menjadi logis kalau kemudian Pak Setjen meminta pos tambahan anggaran untuk pagu 2021. Saya kira itu saja Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang terhormat Romo Muhammad Syafi'i dapilnya Sumut I. Sekarang PKS Pak Adang Daradjatun Komnjen Pol Purnawirawan.

F.PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):

Terima kasih.

Pimpinan/ rekan-rekan Komisi III dan juga para Setjen,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya rasa saya tidak akan mengulangi apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu khususnya tadi yang berhubungan dengan kebetulan di depan saya ada ringkasan tentang hasil pemeriksaan BPK RI. Jadi memang apa yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu masalah-masalah yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan dari BPK RI untuk terus diselesaikan sehingga pada tahun-tahun berikutnya tidak terjadi kembali dan juga tadi menarik apa yang disampaikan khususnya kepada Mahkamah Agung. Betul kami bersama Pak Romo dan teman-teman yang lain sedih begitu kalau melihat ke daerah hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas dan sebagainya. Jadi memang harus ada keberanian untuk merubah pola pikir untuk lebih memberikan ujung tombak dibawah itu diperkuat. Jadi masalah-masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan dan sebagainya betul-betul diperhatikan.

Selain itu juga kami mengharapkan bahwa apa yang disampaikan tadi juga terhadap DPD RI masalah-masalah yang berhubungan dengan prioritasnya juga menjadi perhatian dan secara keseluruhan yang pasti bahwa kami adalah mitra kerja. Kami akan tetap memperhatikan tetapi dengan catatan apa-apa yang disampaikan tadi oleh rekan-rekan terdahulu dan nanti juga tolong menjadi perhatian karena apa pun juga sebagai mitra kerja kita kan memperjuangkan kepentingan-kepentingan mitra kerja sepanjang hal-hal itu memberikan pemenuhan atau mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah prioritas yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu contoh kan Mahkamah Agung prioritas nasionalnya saja tahun 2021 14 prioritas ya mulai dari peningkatan fungsi SPPT TI di pengadilan sampai pembangunan zona integritas. Kita akan kedepan selaku pengawas akan terus melihat apakah prioritas-prioritas ini telah dilaksanakan dengan baik. Itu harapan saya
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Adang Daradjatun.
Berikutnya Fraksi Partai Nasdem silakan bu.

F.P-NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H.):

Baik terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Syalom selamat siang menjelang sore.

Saya mewakili Fraksi Partai Nasdem pada prinsipnya menyampaikan pertama terima kasih Pimpinan dan terima kasih kepada para mitra Pak Setjen DPD RI, MPR RI, Setjen KY, MK dan MA.

Yang saya hormati juga seluruh Anggota Komisi III,

Pada kesempatan ini kami Fraksi Partai Nasdem ditengah pandemi covid-19 tentu saja pertama sekali bagaimana kita menyikapi nanti di tahun 2021 kita akan menghadapi dampak yang luar biasa dari pandemi ini. Oleh karena itu prinsipnya bagaimana merancang satu kontruksi anggaran dengan baik efektif, efisien dan memiliki (...) akibat dari pandemi itu dan berikutnya seperti yang disampaikan Fraksi-Fraksi yang lain bahwa yang menjadi barometer atau ukuran bagaimana anggaran ini dari tahun sebelumnya dan nanti pada tahun 2021 adalah memperhatikan temuan BPK RI. Prinsip dari Fraksi Partai Nasdem tetap mendukung apa yang diusulkan hanya beberapa catatan untuk DPD RI nanti bagaimana dipertajam lagi dipertimbangkan lagi untuk dengan kenaikan yang ada supaya bisa dirasionalisasikan.

Berikutnya untuk MPR RI kami memiliki catatan yang tadinya unsur Pimpinan ada 5 sekarang ada 10. Nah tentu saja dengan usulan yang diajukan oleh Setjen MPR RI saya kira semua Fraksi termasuk Fraksi Partai Nasdem sangat sepatat dan menyetujui dan secara khusus kebetulan saya juga baru kembali dari dapil daerah pemilihan saya Kalimantan Tengah, disana sebagian Kabupaten dan Kota itu mengalami yang namanya PSBB. Jadi mengenai sosialisasi 4 pilar yang tadi disampaikan kawan-kawan yang harus mengumpuli 150 orang kayanya memang tidak mungkin. Nah ini bagaimana solusinya untuk dipikirkan sehingga kami-kami ini bisa tetap melaksanakan itu dan tidak menjadi temuan pada akhirnya. Kemudian untuk KY dan MK terutama untuk MK nanti di tahun 2020 ini pada Desember kita akan melaksanakan pilkada serentak. Nah dengan kondisi itu tentunya ada matrikulasi yang di dapatkan dan mungkin ajuan anggaran yang sudah diajukan ini saya kira juga menjadi pertimbangan bagi Komisi III saya kira semua Fraksi akan *approve* untuk itu barang kali.

Nah secara khusus untuk Mahkamah Agung saya melihat karena saya keliling kalau untuk di pengadilan negeri agak lebih baik hakim-hakimnya. Karena memang biasanya karena itu pengadilan tingkat pertama. Nah yang sangat memprihatinkan adalah para hakim tinggi. Jadi kami mohon perhatian untuk sarana dan prasarana yang disediakan untuk hakim tinggi baik perumahan, baik ruangan karena kami pernah menemukan Pak hakim tinggi itu ruangnya terlalu kecil ada di dapilnya Ibu Eva itu di Jawa Tengah. Jadi 4 orang tidak pakai ac bayangkan *sumuk* (panas) jadi tidak ada *social distancing* disana. Jadi kalau kita lihat berbanding kebalik tadi seperti komentar kawan-kawan dengan kondisi Mahkamah Agung. Jadi maksudnya jangan sampai para hakim yang ada di daerah tingkat pertama dengan yang di MA itu yang PT-Nya justru kaya sandwich kejepit di tengah-tengah Pak. Jadi itu catatan saya untuk bagaimana ini menjadi perhatian khusus supaya anggaran yang diajukan saya kira wajar dan ini harus menjadi perhatian yang sangat komplis untuk dilaksanakan. Saya kira itu beberapa catatan yang bisa kami sampaikan dari Fraksi Partai Nasdem .

Terima kasih selamat sore Tuhan memberkati.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Ary Egahni Ben Bahat.

Paham sekali bicara soal daerah karena Ibu Ari ini suaminya Bupati Kapuas. Berikutnya Fraksi Partai Demokrat Pak Santoso tinggal Pak Santoso mau tidak mau.

Silakan Pak.

F.PD (H. SANTOSO, S.H):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore untuk kita semua.

Pimpinan rapat yang saya hormati,
Bapak dan Ibu Anggota Komisi III,
Bapak-Bapak peserta rapat yang saya muliakan,

Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya *to the poin* saja mencoba menanggapi apa yang menjadi usulan dari eksekutif untuk anggaran 2021. Saya mencoba mengevaluasi dari DPD RI dulu ini. DPD RI saya buka-buka tidak ada catatan usulan tahun 2021 itu berapa begitu. Cuma sudah disebut hanya berdasarkan surat bersama antara Menteri Keuangan Dan Bappenas setuju 934 miliar koma sekian saya tidak tahu usulannya berapa begitu. Terus saya terkaget-kaget usulan tambahannya 2 koma sekian begitu, dua koma sekian triliun 2,326 triliun begitu. Memang DPD RI ya sejajar dengan DPR RI seharusnya memang di dukung begitu. Cuma kalau bisa ya rasional lah. Apa mungkin usulannya dulu 4 miliar mungkin begitu ya karena tidak ada catatannya disini begitu. Jadi kalau usulannya 4 miliar ya mungkin agak rasional juga kalau minta tambahannya 2,32 triliun tetapi kan harusnya dimana-mana dalam penganggaran itu masih ada rasionalisasi anggaran sebelumnya. Kalau tiba-tiba melonjak tajam juga menurut saya dalam sisi penganggaran ini tidak dibenarkan begitu ya tidak masuk dalam logika. Berikutnya yang untuk MPR RI usulannya 1,367 triliun ya

Bapak/Ibu yang saya hormati Pimpinan,

Disetujui 635,499 miliar nah kalau ini saya melihatnya tidak rasional ini Menteri Keuangan dan Bappenas begitu MPR RI itu satu lembaga yang menentukan juga bagian dari keberadaan Indonesia ini. Jadi saya melihatnya diremehkan ini MPR RI dan kebetulan kita-kita MPR RI ya saya bela. Jadi Komisi III ini harus mengusulkan secara maksimal Pimpinan. Kemudian yang berikutnya MA ini ya. MA usulannya 13,8 triliun kemudian disetujui oleh keputusan Menteri Keuangan dan Bappenas menjadi 10,644 triliun sementara yang dibutuhkan 11,58 triliun ya kurangnya cuma 936. Menurut saya kalau kita membaca kebutuhannya ini memang sangat *urgent* tetapi ini juga menjadi bahan evaluasi kita bahwa pemekaran Provinsi Kabupaten Kota juga ini jangan selalu melulu membebani fiskal APBN. Bisa memanfaatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah kan dibolehkan Pak dalam Undang-Undang itu ada hibah dari daerah. Jadi semuanya ini kan nanti Indonesia diperkirakan bisa sampai 700 Kabupaten Kota dengan rentang yang begitu luas provinsinya nanti akan nambah nanti fiskalnya bisa jatuhnya ya di urusan ...(suara tidak jelas) ini dan ini juga menurut saya bukan hanya soal kepada MA nanti juga berdampak kepada Polda dan Polres.

Ini baru fisik bangunannya bagaimana sumber daya manusianya juga akan membebani fiskal. Jadi untuk itu menjadi pertimbangan kedepan juga bagi DPR RI dalam rangka pemekaran provinsi termasuk Kabupaten Kota dan jangan sampai selalu membebani fiskal dan harus ada kreasi juga dari MA ini supaya bisa melakukan kerja sama kepada daerah-daerah yang mempunyai potensi APBD yang sangat besar begitu. Kebetulan saya pernah di DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta itu banyak membantu Kepolisian, Kejaksaan termasuk di pengadilan itu dalam rangka pemberian hibah saya kira di daerah lain juga bisa dan itu bisa dimanfaatkan. Jadi sekali lagi jangan selalu terkait dengan pembangunan ini membebani fiskal di APBN. Karena kan tanahnya biasanya susah Pak dan daerah itu sangat luas untuk

memberikan itu. Yang berikutnya KY 190 miliar untuk mengawasi hakim-hakim ini menurut saya rasional cuma hanya disetujui 109,425 miliar sementara usulannya untuk ditambahkan itu hanya 50,11 miliar. Menurut saya sangat rasionalah Indonesia yang begitu luas untuk mengawasi hakim-hakimnya cuma 190 sebenarnya ini tidak masalah begitu.

Nah yang berikutnya tambahan terakhir dari saya supaya juga kalau seandainya ada tambahan yang tidak bisa maksimal sesuai dengan keinginan Kementerian dan Lembaga perlu juga dilakukan rasionalisasi. Jadi jangan begitu di kan ini belum merupakan hal yang mutlak ya angka itu poin kegiatannya adalah a,b,c, ini kan bisa dirasionalisasikan. Cobalah dirasionalisasikan sehingga tambahan yang nanti diberikan misalnya tidak maksimal tetapi bisa *mengcover* semua yang menjadi kebutuhan dari pihak Kementerian atau Lembaga. Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Santoso.
Terakhir Fraksi PKB

Yang terhormat Bapak Dipo Nusantara Pua Upa,

Silakan Pak.

F.PKB (N. M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H, M.Kn.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Setjen DPD RI, Setjen MA, Setjen KY, Setjen MK dan Setjen MPR RI

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya secara umum saja Pak karena semua sudah dilengkapi sama sahabat-sahabat saya tadi. Disini saya menambahkan dan menegaskan apa yang dikatakan Romo tadi sudah lengkap juga. Saya hanya mau meambahkan sedikit. Usulan penambahan anggaran untuk semua Kementerian dan Lembaga ini jangan berharap dari anggaran baru Pak tetapi dapat pula dari penghematan yang berasal dari pagu indikatif tahun 2021. Dari saya itu saja Pak cuma dari khusus untuk Mahkamah Agung saya juga ini Pak perlu perhatian bapak di daerah-daerah di Kabupaten-Kabupaten terutama di NTT itu Pak rumah-rumah hakim dan kantor-kantor itu sangat butuh bantuan dan butuh perhatian dan butuh atensi dari bapak disini. Karena

kalau kita melihat kantor Mahkamah Agung disini setelah kita turun ke daerah dibandingkan sangat kasihan sekali Pak. Jadi terutama dari teman-teman hakim di daerah Pak tolong diperhatikan terutama rumah-rumah mereka disana untuk supaya lebih layak dari sebelum-sebelumnya. Dari saya begitu saja Pak.

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Yang terhormat Bapak Dipo Nusantara Pua Upa,

Pak Habiburokhman mau mengajukan pertanyaan silakan.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Singkat satu menit.

KETUA RAPAT:

Nah satu orang satu menit bisa tidak ini sudah setengah 5 ini.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Bisa-bisa.

KETUA RAPAT:

Ini dua pengacara Pak Arteri tolong satu menit nanti Pak Arteri ya. Silakan Pak Habib.

F.P-GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan yang bijaksana sekali.

Kebetulan rekan saya sejawat saya di MKD kalau MKD memang bijaksana. Kepada Mahkamah Agung saya sedikit bertanya soal direktori putusan itu Pak. Itu kan apakah dibawah sarana prasarana atau apa cuma faktanya kita melihat itu memprihatinkan sekali. Kalau kita bandingkan direktori putusan jangankan dengan negara yang maju dengan MK saja bagaikan langit dan bumi bukan memuji MK ya. Oke MK lebih sedikit, MK itu hari ini putus bisa diakses. Jangan bandingkan dengan MK lah bandingkan dengan swasta saya sebut merek dengan hukum online saja. Hukum online kan logikanya dapatnya dari Mahkamah Agung tetapi kita cari putusan banyak dapat begitu diketik keluar memang agak repot registrasi dulu pasti kendalanya tidak jauh-jauh di anggaran karena ini soal IT kami ingin itu diberi perhatian khusus Pak sekretaris.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan kalau bisa kaya Pak Habib. Tolong jangan terlalu banyak pengantar Pak Arteria Dahlan.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pertama mengenai e-court e-litigation e-salinan sama layanan virtual. Saya ingin sampaikan Ketua hakim itu wakil Tuhan di dunia. Berlakulah keyakinan hakim. Bagaimana ada keyakinan hakim kalau kita pakai virtual ini saya ingin menggugah kita semua ini karena apa implikasinya nanti banyak anggaran Pak pengadaan-pengadaan terkait dengan komputer ini mohon juga dijadikan pertimbangan. Kemudian juga biaya-biaya ini harus setimpal Pak. Tadi dikatakan ada anggaran terkait dengan e-court e-litigation dan sebagainya dapatin putusannya masih lama begitu loh ini kritik juga buat Mahkamah Agung. Kemudian berikutnya dari anggaran yang dinaikan pada tahun 2021 ini yang mempunyai kemanfaatan yang mana Pak. Saya ingin tanya ini sama Pak Sekretaris yang mana. Kemudian pembangunan gedung kantor pengadilan baru PN mana saja. Kemudian utamanya Pak pada saat kita datang ini adalah bagaimana masalah rumah dinas, bagaimana ruang kerja hakim pengadilan tinggi ini tidak terjabarkan disini Pak. Makannya kalau dikatakan memang menar gading jangan-jangan betul menara gading.

Kasihannya hakim-hakim kita yang di daerah bapak tuntutan hakim itu harus bersih Pak tetapi perhatian kebawah tidak ada. Nah apalagi kalau kita melihat halaman 12. Dari poin dua program penegakan hukumnya cuma 403 miliar dari total 10,6 triliun tidak sampai 5%. Apa yang mau dikerjakan makannya memang jomplang anggaran ini sehingga apa yang dibawah tidak terasakan. Berikutnya mengenai program prioritas lembaga. Saya ingin tanya poin satu Pak belanja barang operasional untuk menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik. Itu habis 493 miliar sendiri Pak alasan covid kasihannya ini alasan covid jadinya jadi bisnis baru. Berikutnya juga kebutuhan belanja modal untuk pembangunan 25 gedung pengadilan. Pengadilan yang mana Pak kita jadi biar kita punya komparasi. Berikutnya yang mana rumah-rumah dinas. Bagusannya itu hakim-hakim dibuat flat saja Pak dari pada jadi AKBP Pak (Anak Kelas Belakang Pengadilan) Pak. Ini Pak kita minta betul dijadikan perhatian. Terakhir kita punya janji Komisi III kalau tidak salah Pak Ketua bagaimana tunjangan atau jaminan-jaminan terkait dengan kesehatan, keamanan dan perumahan hakim itu.

Ya wajib hukumnya dalam mata anggaran tahun 2021 ini bisa diwujudkan sehingga pada saat kita ke daerah nanti memang kelihatan kerja-kerja Komisi III Ketua. Berikutnya mengenai KY Ketua.

KETUA RAPAT:

Sudah lebih satu menit Pak Arteri.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Oh bagaimana boleh tidak?

KETUA RAPAT:

Cukup-cukuplah ya.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Cukup ya.

KETUA RAPAT:

Biar ini ya. KY langsung saja nanti dengan Pak Arsul Sani bisa. Cukuplah ya Pak Santoso dulu.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ini KY mau dikasih anggaran buat apa Ketua pertanyaannya. Untuk seleksi Hakim Agung dikasih 5 miliar hasilnya bobrok ditolak semua kemarin. Sekarang minta tambahan lagi Ketua 9 miliar ngaca dong. Kita juga harus ditengah sulitnya seperti ini Ketua kami mohon betul teman-teman di KY intropeksi dirilah. Jadi pada saat, bapak ini paparannya paling bagus diantara mitra-mitra tetapi yang saya katakan sensitifitas bagaimana meminta anggaran ditengah capaian kinerja dari KY itu sendiri Ketua.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf Pak Arteria Dahlan subtansinya sudah masuk ya. Silakan Pak Santoso ada tambahan mungkin terlupa tadi.

F.PD (H. SANTOSO, S.H):

Setengah menit terima kasih Pimpinan.

Saya hanya ingin menghimbau supaya dalam laporan keuangannya ini Pak ini harus seragam dong begitu ada yang pakai tabel ada yang tidak sehingga kalau bela diri ini ini alirannya beda-beda ini ada yang kunfu, ada yang karate begitu. Jadi kalau orang melihat anggarannya triliunan tetapi penyusunannya ini sendiri-sendiri begitu. Apa tidak ada yang mengarahkan begitu. Lain waktu mesti seragam Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Santoso.
Paling terakhir anak Medan Pak Nasir Djamil.

F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):

Terima kasih karena waktu yang sangat singkat.

Saya berharap pada Pimpinan atau kepada Setjen MPR RI Pak Ma'ruf tolonglah dibuat modul sosialisasi 4 pilar untuk semua kalangan mulai dari paud, tk, sd, smp, sma sampai ke mahasiswa bahkan sekmen-sekmen diluar itu. Uang yang digelontorkan itu tidak sedikit nah karena itu cobalah dengan kepemimpinan baru dibuat modul itu sehingga bukan orang dewasa saja yang maaf yang paham pancasila. Anak-anak juga sejak kecil harus kita kasih paham mereka itu pancasila. Sehingga kemudian ketika mereka sd dia dapat lagi, ke smp dia dapat lagi, sma dia dapat lagi ketika dia kampus dia dapat lagi, ketika dia keluar kampus dia dapat lagi itu pentingnya. Kita namanya negara pancasila tetapi anak-anak kadang-kadang tidak mengerti pancasila. Bahkan anak-anak lagi sekarang garuda pancasila pun tidak tahu dia lagunya sreperti apa. Mungkin diantara kami juga lupa garuda pancasila bla-bla itu. Nah itu Pak Ma'ruf tolong dibantu Pimpinan MPR RI untuk membuat modul itu sehingga ketika Anggota MPR RI melakukan sosialisasi bukan hanya untuk anak-anak besar saja orang dewasa seperti sekmen-sekmen usia yang saya sebutkan tadi kalau ada itu top kalau tidak mundur saja Pak Setjen kira-kira begitulah dan ini sudah saya sampaikan sebenarnya kepada Pimpinan MPR RI tetapi ya maklumlah mungkin mereka sibuk dengan agenda masing-masing.

Yang kedua pernah saya sampaikan juga bagaimana ketika Anggota MPR RI melakukan sosialisasi itu ada baju seragam yang mereka pakai sehingga kemudian mereka berwibawa jadi modulnya mantap bajunya juga berwibawa orangnya apalagi kira-kira begitu itu harapan kami kepada MPR RI. Kepada Mahkamah Agung ini mohon maaf sedikit Ketua. Memang tugas Sekretaris Mahkamah Agung ini berat, dia tugasnya membantu Ketua Mahkamah Agung menyelenggarakan korenasi, mendukung pembinaan teknis, administrasi, organisasi, financial seluruh unsur Mahkamah Agung. Oleh karena itu tadi beberapa Anggota sudah mengatakan soal bagaimana situasi di Mahkamah Agung. Saya si tidak menolak dan tidak melarang tetapi bagaimana kemudian apa yang disampaikan oleh sejumlah Anggota Komisi III tadi juga dibawa ke daerah begitu. Jadi kalau misalnya Mahkamah Agung interiornya bagus bangunannya bagus tolong itu di tularkan ke daerah-daerah Pak sehingga kemudian daerah juga bisa punya rasa yang sama cita rasa yang sama itu Pak Sekretaris Mahkamah Agung mudah-mudahan ini menjadi catatan.

Terutama juga soal direktori yang disampaikan Habiburokhman tadi itu. Banyak orang yang kemudian mendaftarkan perkaranya itu lama dia tidak mendapatkan nomer register. Jadi bagaimana kemudian keuangan yang ada di Sekretaris Mahkamah Agung itu bisa kemudian menyelenggarakan korenasi pembinaan dukungan tadi bla-bla saya katakan tadi itu. Untuk apa kita anggarkan ini kemudian korenasi lambat, pembinaan ...(suara tidak jelas) tidak maksimal dan sebagainya dan yang terakhir kepada KY kalau saya melihat daya serap anggarannya ini KY memang minim sekali ide dan kreatifitas. Jadi tolong KY barang kali bisa misalnya menyewa tim ide dan kreatifitas sehingga uang yang tadi itu dikeluarkan dengan ide-ide dan kreatifitas. Tadi saya melihat bagaimana misalnya upaya untuk menjaga hakim dan sebagainya kalau di tahun 2021 dianggarkan 15 miliar itu sedikit sebenarnya tetapi kalau saya melihat daya serap tadi itu saja masih sedikit

daya serapnya untuk tahun 2020 daya serapnya sedikit. Nah karena itu dalam pandangan saya dalam pikiran saya ini kayanya kurang ide kurang kreatifitas padahal banyak hal yang harus kita lakukan untuk mendongkrak reputasi hakim tadi itu.

Jadi tugas KY itu adalah menjaga kehormatan keluhuran dan martabat hakim ya itu sebenarnya. Jadi kalau kemudian martabat hakim rendah, keluhuran hakim rendah KY yang harus dibubarkan kira-kira begitu bahasanya kira-kira bukan saya ingin membubarkan KY tidak say kira begitulah.

Terima kasih Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nasir Djamil.

Selesai Bapak-bapak dari KY, MK, Mahkamah Agung, MPR RI dan DPD RI. Dari waktu yang disepakati kita berakhir pukul 17.00 WIB pas sekarang ini dan kalau kita melihat tadi 9 Fraksi plus ada 4 tambahan itu semua bicara soal Mahkamah Agung. Nah kita minta pertanggung jawaban Setmah (Sekretaris Mahkamah Agung) yang pertama baru setelah itu ke kiri KY baru terakhir DPD RI. Tadi dimulai oleh DPD RI diakhiri oleh DPD RI silakan masing-masing 5 menit sudah tidak usah banyak pengantar lagi Pak langsung poinnya saja.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG (H. ACHMAD SETYO PUDJOHARSOYO, S.H., M.Hum):

Baik terima kasih Pimpinan sidang.

Dari saya rangkum saja supaya cepat karena dari 12 pertanyaan tadi yang banyak juga untuk Mahkamah Agung itu ada 3 poin, poin pertama tentang postur anggaran, kemudian tentang kesejahteraan hakim dan juga pembangunan pengadilan di daerah yang jangan membebani APBN intinya seperti itu. Kami perlu sampaikan bahwa mengenai postur anggaran tahun 2020 ini anggaran pusat itu hanya 32,2% sedangkan 67%-Nya ini untuk 67,98 ini untuk daerah semuanya, 32% itu pun terbagi ke dalam 7 satuan kerja pusat yaitu di para eselon I di Mahkamah Agung seperti kepamitraan, kemudian Dirjen Badilum, Badilak maupun Mildun. Sedangkan Mahkamah Agung sendiri tahun ini pun juga tidak ada kegiatan pembangunan perbaikan pembangunan di dalam kecuali untuk pemeliharaan yang hanya 40 miliar yang untuk kantor pusat di Mahkamah Agung itu sendiri. Disisi lain ketika Mahkamah Agung mengalami penyesuaian anggaran karena covid-19 bahwa yang dipotong itu anggaran-anggaran yang ada di Mahkamah Agung semua di daerah kita tidak kenakan pemotongan.

Kecuali untuk pembangunan pengadilan ini memang harus dipotong karena daerah pun angkat tangan karena tidak adanya tenaga kerja yang ada disana sehingga kami kita revisi untuk kita masukan di anggaran 2021. Kemudian untuk masalah kesejahteraan hakim memang kalau kita perhatikan

kesan kita disini karena satuan tiganya kita tidak laporkan disini nanti kalau ketika nanti kita akan setelah selesai mendapatkan anggaran baru kita laporkan. Kami perlu laporkan bahwa terkait dengan masalah kesejahteraan hakim antara lain bahwa sampai saat ini pemerintah belum memenuhi putusan atau belum melaksanakan putusan HUM 94 Tahun 2012. Yang ada dua putusan HUM terkait dengan PP 94 Tahun 2012 yang pertama nomor 23 tahun 2018 diputus 18 Desember 2018. Kemudian nomor 25 tahun 2017 diputus 18 Desember 2018 sudah sekian lama kami sudah berupaya untuk berkordinasi baik dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Setneg tetapi sudah 19 kali kami rapat tetapi sampai hari ini juga belum ada realisasi terkait dengan pelaksanaan putusan HUM itu sendiri. Tentu kami berharap bahwa DPR RI akan memberikan dukungan terkait dengan pelaksanaan putusan HUM.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf soal apa itu Pak?

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG (H. ACHMAD SETYO PUDJOHARSOYO, S.H., M.Hum):

Tentang kesejahteraan hakim tadi PP tentang Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim. Inilah salah satu persoalan yang kita hadapi. Disisi lain ada juga.

KETUA RAPAT:

Ini saja Pak supaya tidak panjang lebih baik surat bapak itu kalau bisa dikasih ke kita mungkin kita juga bisa komunikasi ke Setneg.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG (H. ACHMAD SETYO PUDJOHARSOYO, S.H., M.Hum):

Baik-baik.

KETUA RAPAT:

Kita tunggu besoklah Pak ya.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG (H. ACHMAD SETYO PUDJOHARSOYO, S.H., M.Hum):

Dokumennya akan kami berikan.

KETUA RAPAT:

Apalagi sudah rapat 19 kali bila perlu Pak Pratiknonya kita panggil kemari Pak.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG (H. ACHMAD SETYO PUDJOHARSOYO, S.H., M.Hum):

Baik terima kasih dukungannya.

Kemudian yang kami juga perlu tambahkan menyangkut jaminan kesehatan hakim. Kami sebenarnya sudah berkali-kali rapat dengan Kementerian Keuangan yang kami butuhkan adalah revisi perubahan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 yang juga sampai sekarang masih belum disetujui di Kementerian Keuangan. Karena juga kita tahu bahwa hakim kondisi jaminan kesehatan memang sangat memprihatinkan sehingga kalau pada kesempatan ini DPR RI juga memberikan dukungan khususnya Komisi III memberikan dukungan kami kami sangat bersyukur.

KETUA RAPAT:

Kasih saja Pak itu termasuk usulannya ke kita Pak.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG (H. ACHMAD SETYO PUDJOHARSOYO, S.H., M.Hum):

Baik.

Untuk selebihnya terkait dengan pembangunan daerah kami sudah banyak kerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan MoU MoU dan kami dan banyak juga diberi gedung baru. Ada juga tanah-tanah yang kami bangunannya kita bangun tetapi tanahnya dari Pemda ini sudah banyak sehingga kami memang tidak memberikan beban kepada APBN kita karena kami juga sangat paham betul bahwa kondisi APBN kita mesti harus digunakan sebaik-baiknya. Kemudian terkait dengan masalah direktori putusan memang persoalan yang kita hadapi masalah direktori putusan ini ini khususnya ada di kepanitraan Pak bahwa memang kita jujur saja bahwa penyelesaian putusan untuk diputus itu ...(suara tidak jelas) bagus sekali cuma persoalannya bukan cuma anggaran Pak tetapi kondisi kebutuhan hakim yang saat ini harusnya 60 saya pikir Hakim Agung hanya 47 orang itu pun juga banyak yang usianya menjelang purna bakti. Kalau ini juga tidak ada dukungan dari DPR RI terkait dengan rekrutmen Hakim Agung yang dilakukan oleh KY dan kemudian disini juga ditolak kami semakin lama semakin habis Hakim Agung dan tentu akan mempengaruhi kinerja Mahkamah Agung.

Saya kira untuk sementara demikian selebihnya kami akan laporkan baik dalam bentuk satuan tiga nanti setelah anggaran ini jadi atau pun hal-hal lain yang kami komunikasikan. Satu lagi Pak tadi yang disampaikan bahwa kordinasi komunikasi Mahkamah Agung dibidang tadi kurang berkomunikasi dengan Komisi III Pak. Secara formal kami memang melakukan komunikasi seperti ini tetapi secara informal kami juga harus berkomunikasi dengan ...(suara tidak jelas) para hakim ya. Iya kami akan terus membangun komunikasi secara informal maupun formal. Jadi prinsipnya bahwa dukungan ini kami perlu tetapi tahun ini karena masalah covid ini kami juga tidak keluar dari sarang Pak. Kami semuanya tidak da keluar dari kantor kami hanya berada di kantor bahkan pembinaan-pembinaan kami lakukan secara virtual.

Salah satu dampaknya adalah anggaran kita untuk perjalanan dinas sudah kami 0 kan Pak. Tahun ini kami tidak ada perjalanan dinas untuk kegiatan pembinaan hanya melalui virtual saja, demikian.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Ketua kalau boleh begini Ketua.

KETUA RAPAT:

Sudah Pak Arteri biar ini saja.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Komunikasi Ketua baru. Ketua baru harapan baru.

KETUA RAPAT:

Ini nanti Pak ini saja jadi pintunya semua Pak Pudjo termasuk dengan Pak Sarifudin yang baru Ketua yang baru.

Silakan Setjen KY.

SETJEN KY (Dr. Ir. TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT, MT., ME., MM., M.IP):

Terima kasih Pimpinan.

Saya akan coba menyampaikan dengan berurut yang pertanyaan pertama kedua terima kasih Pak Nurdin Pak Arsul. Perlu kami sampaikan terkait temuan BPK RI yang tadi disampaikan itu temuan tahun 2018 dan di semester pertama tahun 2019 langsung kami tindak lanjuti. Yang terjadi yang 2 miliar itu jadi dianggarkan gedung tetapi waktu itu karena DED-Nya belum disetujui oleh Kementerian PU sehingga

KETUA RAPAT:

Mohon maaf Pak Pak Nurdin itu Pak.

SETJEN KY (Dr. Ir. TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT, MT., ME., MM., M.IP):

Sehingga kami alihkan komputer dan server Pak karena memang kita kurang ada CPNS 31 orang CPNS. Kemudian temuan BMN yang 225 unit itu sudah kami audit dan sudah dikembalikan dan ada 153 sisanya masih kita cari terus itu Pak. Karena saya baru per Mei tahun lalu tugas itu satu tahun. Kemudian terima kasih untuk kemudian juga mobil dinas kami juga semua struktural tahun lama Pak tahun 2006, lift juga sudah lebih dari 10 tahun sehingga memang kita banyak hasil audit kami yang harus diperbaiki terhadap fasilitas di Komisi Yudisial. Kemudian terhadap pertanyaan dari Pak

Santoso, Pak Supriansa dan Pak Nasir kurang lebih hampir sama. Terima kasih atas *support* dan dukungannya. Kami saat ini serapan per 23 Juni 2020 42,97% tanpa ada perjalanan itu kondisi covid. Jadi hanya di kantor artinya rutin kami memang sangat besar Pak itu yang kami sampaikan dan pagu 80 itu atau hanya 62% kalau dibanding tahun 2015 jadi 5 tahun yang lalu kami 128, 5 tahun kemudian hanya 62% dari 5 tahun yang lalu itulah pagu kami. Jadi mohon dipertimbangkan karena rutin kita yang besar sehingga yang teknisnya sangat kecil sekali.

Kemudian juga Pak Romo terima kasih. Kemudian Pak Romo, Pak Adang dan Pak Dipo hampir sama usulan yang baru akan kita coba khususnya inisiasi-inisiasi dalam ...(suara tidak jelas) hakim dengan pemanfaatan IT itu kami lakukan dan khusus kepada Pak Syarifudin Suding dan Pak Arteria Dahlan terkait seleksi calon Hakim Agung akan kami tampung kami sampaikan kepada Pimpinan. Namun kami informasikan mulai tahun ini kami coba dengan mencapai sesuai dengan permintaan Komisi III terakhir sehingga terukur semua dan kami tidak ingin mengulangi setahun yang lalu yang diawal tahun yang 4 ditolak. Kami laporkan kalau tahun lalu itu kan dari yang baru lalu dari 10 permintaan 6 CH dan 4 Hakim Ad Hoc *alhamdulillah* yang ditolak dua dan 8 disetujui. Jadi kedepan yang nanti Juli sekarang juga satu pertama kami coba untuk ICO dan kami mencoba dilakukan dengan 4 tahap yang dengan asesor-asesor yang cukup profesional.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Sekarang ini bapak kan seleksinya bisa manual Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Arteria Dahlan tolong melalui meja Pimpinan dulu.

F.PDI-P (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Oh iya Pak siap.
Masalah seleksi calon Hakim Agung.

KETUA RAPAT:

Sebentar-sebentar Pak Arteri.
Sekarang tidak ada sesi tanya jawab lagi karena mereka ini saja sudah lebih dari 5 menit ini jawabnya. Nanti langsung saja ada tidak nomor telepon bapaknya nanti kita kasih Pak Arteria Dahlan. Lanjut.
Terima kasih.

SETJEN KY (Dr. Ir. TUBAGUS RISMUNANDAR RUHIJAT, MT., ME., MM., M.IP):

Yang terakhir Pak Nurdin kami untuk Ibu Ary egahni kami memang tahun lalu ada peradilan khusus pemilu. Harapannya kalau di itu apakah ada atau tidak namun anggarannya belum tersedia kalau untuk itu di kami. Jadi

kami pengawasan hakimnya hakim yang general sebab itu beda lagi pengawasan. Barang kali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih jadi sebagai informasi sekali lagi anggaran kami dibanding 5 tahun yang lalu hanya 62% dibanding 5 tahun yang lalu. Jadi inflasi diabaikan dalam 5 tahun. Mohon dipertimbangkan dan tambahan kami pun itu sesuai dengan renstra malah kita turunkan kita ciutkan efisiensi jadi tambahan 55 itu hanya menjalankan fungsi tupoksi Komisi Yudisial.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.
Silakan Pak Setjen MK.

SETJEN MK (M. GUNTUR HAMZAH):

Baik terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jangan lupa bukunya Pak ya kalau bisa besok sudah diantar Pak.

SETJEN MK (M. GUNTUR HAMZAH):

Siap Pimpinan.
Terima kasih.

Jadi yang pertama izin Pimpinan. Yang pertama dari Pak Nurdin terima kasih Pak atas saran terbaiknya. Terkait dengan pemilu serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan nanti 2 Desember 2020 ini Mahkamah Konstitusi seperti saya katakan menangani di bulan Januari. Nah terkait ini memang belum ada anggaran penanganan perkara untuk pemilu kada tahun 2020. Jadi mohon nanti ini mungkin menjadi perhatian dari DPR RI. Nah mengenai berapa perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi dalam 3 kali pemilu kada yang berlangsung tahun 2015, 2017, 2018 itu rata-rata 54%. Tahun 2015 kemarin yang penanganan perkara untuk pemilu kada yang 269 karena tahun ini tambah satu jadi 270 karena Makasar. Ini perkara yang masuk pada waktu itu tahun 2015 157 dan memang flatnya rata-rata separuh dari daerah yang menyelenggarakan pilkada dan ini sudah sebagaimana surat kami dan laporan kami sudah kami cantumkan semua terkait dengan data-data menyangkut perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Untuk Pak Arsul Sani dan Pimpinan saya akan menyampaikan terkait dengan anotasi ini kepada Pimpinan. Sebetulnya Pimpinan kami sudah menyampaikan juga kepada Sekretariat di DPR RI. Memang tetapi tidak semua kami berikan karena terbatas.

KETUA RAPAT:

DPR RI apa Komisi III pak?

SETJEN MK (M. GUNTUR HAMZAH):

Komisi III maaf..

KETUA RAPAT:

Oh Komisi III.

SETJEN MK (M. GUNTUR HAMZAH):

DPR RI pun kami berikan juga, Komisi III juga kami berikan tetapi ya itulah ada sudah kami sampaikan yang mulia Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf Pak supaya tidak ada dusta diantara kita. Ibu ini Kepala Sekretariat Komisi III belum ada katanya.

SETJEN MK (M. GUNTUR HAMZAH):

Iya kalau laporan kami dari MK buku anotasi. Bukan buku tetapi anotasi putusan Mahkamah Konstitusi.

KETUA RAPAT:

Mau dicek dulu Pak lanjut Pak.

SETJEN MK (M. GUNTUR HAMZAH):

Kami yakin karena kami komitmen untuk menyerahkan karena pada RDP yang lalu sudah dimintakan seperti itu sehingga kami sudah menyerahkan. Terakhir justru ke Pak Arsul Sani itu saya kira tetapi kalau toh juga nanti akan kami berikan kembali tidak ada masalah karena itu kami tetap bisa membuatkan kembali. Kemudian dari Ibu Ary Egahni terkait dengan matrikulasi terima kasih bu. Justru inilah yang menjadi salah satu komitmen kami untuk senantiasa yang kami di MK disebut dengan Bimtek. Sebelum penyelenggaraan pemilu kada itu tentu kami akan selenggarakan terlebih dahulu adalah Bimtek dan dalam rangka matrikulasi untuk memastikan bahwa hukum acara yang akan nanti digunakan itu dapat dipaham oleh seluruh stakhoder Mahkamah Konstitusi tetapi mohon maaf lagi ini bu terkait dengan ini belum ada anggarannya sehingga untuk tahun 2020 ini kami tadi sudah mengajukan untuk tahun 2020 ini tambahan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan matrikulasi atau Bimtek tersebut.

Jadi secara program kami sudah buatkan cuma tinggal menunggu anggaran dari pemerintah. Saya kira ini selebihnya dari Ibu/Bapak Anggota Komisi III kami ucapkan terima kasih atas seluruh masukan dan perhatian kepada Mahkamah Konstitusi, demikian. Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.
Silakan Setjen MPR RI.

SETJEN MPR RI (Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H):

Terima kasih Pimpinan.

Ada dua hal yang ingin kami sampaikan, yang pertama adalah kami menyampaikan apresiasi terhadap masukan dan saran dan kebetulan hadir disini Pak Suding sebagai Pimpinan Banggar. Bapak dan Ibu tentu masukan-masukannya sangat berharga nanti akan kami diskusikan dan laporkan melalui mekanisme internal termasuk kepada Pimpinan. Yang kedua adalah respon terhadap catatan-catatan yang tadi disampaikan saya kira saya tidak sebutkan satu persatu. Tadi yang menyangkut materi dari Pak Nasir Djamil termasuk juga kami. Tentu kami akan segera tindak lanjuti termasuk atribut-atribut yang dipakai pada saat melakukan sosialisasi dan tahun ini kami sudah lelangkan Pak untuk atribut mudah-mudahan bisa segera dibagikan dan kemudian untuk metoda dalam Badan Sosialisasi sudah ada pokja-pokja terkait dengan perbaikan untuk metoda materi yang disana adalah nanti akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah materi dan metoda yang selama ini memang belum bisa optimal dalam melaksanakan sosialisasi Pak. Kemudian terkait dengan fleksibilitas saat pandemi Pak tidak hanya di Badan Sosialisasi tetapi juga di Badan Pengkajian. Tadi ada pertanyaan dari Pak Santoso saya kira cara-cara virtual sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan percepatan dan mudah-mudahan nanti juga akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Perlu kami laporkan bahwa memang anggaran kita di tahun ini di MPR RI itu dipangkas hampir tadi 35 sampai 40%. Tahun 2019 yang lalu itu anggaran MPR RI adalah 958 Pak dan setelah ada penambahan anggota maupun Pimpinan ternyata hanya kita diberikan alokasi anggaran setelah dipotong 576 miliar. Saya kira ini yang kemudian kita mengajukan tambahan anggaran seperti tadi yang disampaikan untuk kegiatan-kegiatan di tahun 2021. Jadi jumlah varian kegiatan sudah tadi kami laporkan untuk kepentingan-kepentingan dalam rangka mendukung optimalisasi tugas-tugas dari pada MPR RI. Saya kira itu catatan-catatan dari kami Pak yang direspon yang merupakan respon dari yang disampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terakhir Setjen DPD silakan.

SETJEN DPD RI (Dr. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M):

Baik terima kasih.

Assalamu'alaikum

Kami mencatat dari Pak Nurdin, Pak Arsul Sani, Pak Supriansa, Pak Syarifudin Suding dan kemudian Romo H.R. Muhammad Syafi'i, kemudian Pak Adang Daradjatun, Ibu Ary Egahni Ben Bahat termasuk Pak Santoso Demokrat, kemudian Pak N.M Dipo Nusantara Pua Upa. Izinkan kami yang pertama bahwa kalau tadi ditanyakan daya serap dari Pak Nurdin kami 96,77% tahun 2018, tahun 2019 kami bisa 98,76% dan hal ini kami mencatat 42% bisa kita serap anggaran di DPD RI Insya Allah dan kemudian terkait dengan temuan kami hormati benar yang disampaikan tadi kami pasti merujuk kepada LHP BPK RI dan pasti kami tindak lanjuti kami punya komitmen yang kuat untuk itu. Benar bahwa yang disampaikan tadi terkait honor. Honor itu terdapat duplikatif benar tetapi kami sudah tindak lanjuti termasuk juga tadi disampaikan Pak Syarifudin Sudding mengatakan ada temuan BPK RI pada keprotokolan kami akui itu lebih kepada dukungan kami kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI dalam menggunakan fasilitas *VIP room*. *VIP room* ini harus kami *back up* Pimpinan kami Anggota kami di bandara dan itu kemudian menjadi temuan karena memang kami belum menandatangani dalam kaitannya dengan kontrak dan seterusnya tetapi tidak ada pengembalian sifatnya masih ...(suara tidak jelas) statif itu yang terkait dengan temuan. Kemudian Pak Arsul Sani tadi tidak menanggapi. Kemudian Pak Supriansa benar Pak 2,3 jadi begini sekaligus menjawab. Kami mengusulkan Pak Santoso pada tanggal 2 Maret adalah 3,2 triliun ada di halaman 6 Pak.

Namun ternyata yang disetujui pada pagu indikatif hanya 934 miliar. Berarti dari 3,2 triliun indikatifnya 932 makannya kami mohon perkenan dukungan dan persetujuan pada forum yang mulia ini untuk mendapat dukungan. Karena kami sadar tidak mampu mendukung Pimpinan dan Lembaga kalau dengan anggaran seperti itu. Nah dari situ memang tidak dibantah dari selisih 3,2 triliun menjadi hanya 934 miliar itu ada komponen besar 1,9 triliun, 1,9 triliun itu adalah selisih dengan 2,3. 1,9 itu lebih kepada memenuhi amanah Undang-Undang MD 3 bahwa DPD RI disana dikatakan berkantor di daerah dan berdomisi di daerah, bersidang di Jakarta. Kami dalam batas itu kalau dikatakan MA ada keterbatasan kami juga ada keterbatasan karena sarana prasarana kami di daerah dan kami sudah dapat hibah-hibah dari para Gubernur. Gubernur hanya ini kapan ini mau diselesaikan sarana anda ko disini baru akan terus akan, akan, akan terus. Nah inilah yang menjadi persoalan kami untuk memberikan dukungan yang signifikan kepada para Anggota terkait dengan 1,9 dan mudah-mudahan ini bisa disetujui.

Kalau pun tidak mohon maaf kami 326 miliar ini adalah bentuk program termasuk tadi masalah terkait dengan protokol Pak hubungan ke masalah. Pak bagaimana mungkin kami bekerja dengan anggaran 9 miliar untuk humas, humas kami hanya 9 miliar Pak kami tidak bisa publikasi sedangkan Pimpinan dan Anggota sangat membutuhkan publikasi. Jadi dengan dasar inilah kami beragumen memohon tentunya dukungan dari Komisi III. Tadi Pak Pimpinan menyampaikan salam Pak kepada Pimpinan Komisi III dan segenap jajarannya Pak untuk mohon dukungan dan perhatian serta persetujuannya

kira-kira begitu Pak terhadap anggaran DPD RI memang sangat kami butuhkan ini Pak. Terima kasih Pak waduh terima kasih banget Pak. Kemudian perbaikan kembali nomenklatur kami perhatikan. Kami hormat Pak terkait program tepat sasaran tepat pertanggung jawaban benar itu memang kami terus lakukan. Tambahan memang sudah seharusnya tadi Pak Muhammad Syafii terima kasih Pak dukungannya. Kemudian Pak Adang Daradjatun ringkasan LHP BPK RI terus kami tindak lanjuti Pak.

Ibu Ary Egahni kami sangat mendukung terima kasih bu atas dukungannya dan efektif serta rasional *alhamdulillah*. Pak Santoso tadi sudah terjawab Pak jadi 3,2 triliun tetapi hanya 934 tidak bisa bergerak kami Pak mohon maaf Pak izin Pak. Iya diantaranya sarana prasarana pelayanan di daerah itu sangat minim Pak. Para Gubernur itu sudah menanyakan semua. Kami dari Bali dapat hibah tidak boleh dilakukan, mohon maaf di Bali sudah diberikan hibah dan kami sampai buat perjanjian tidak boleh digunakan untuk yang lainnya hanya untuk gedung kantor DPD RI tetapi yang representatif ini hanya 3 Sumatera Selatan, DIY, NTT yang lainnya sudah dapat hibah hibah 16 tidak pernah bisa kita tindak lanjuti. Pimpinan merasa terpanggil dan memohon kepada Komisi III pada hari ini sehingga betul. Kemudian Pak Dipo Nusantara kami hormat Pak terima kasih tadi penghematan pada pagu indikatif. Jadi memang dengan angka 934 ini sangat betul-betul kami menderita lahir dan batin kira-kira begitu. Demikian yang dapat kami sampaikan.

Burung lhyan, burung cendrawasih
sekian dan terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dony.

Kelihatan Pak Dony ini birokrat tulen dan kawakan jago pencak silatnya. Dari Setjen Depdagri Wakil Rektor IPDN Pak ya.

SETJEN DPD RI (Dr. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M):

Dirjen Keuangan Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan daerah Kemendagri sekian kali staf ahli, sekian kali Direktur kemudian menjabat Gubernur Sumatera Barat, kemudian Wakil Gubernur IPDN, kemudian sekarang Setjen DPD RI.

KETUA RAPAT:

Dan salah seorang juga kandidat Gubernur Sumbar Pak.

SETJEN DPD RI (Dr. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M):

Siap.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak/Ibu Anggota Komisi III, Setjen KY, Setjen MK, Sekretaris Mahkamah Agung, Setjen MPR RI dan Setjen DPD RI.

Dari meja Pimpinan kami ada beberapa catatan pertama 9 penanya Pak *plus* 4 yang tambahan semuanya ini juga saya kira baru mengkritisi hasil temuan BPK RI. Kalau boleh semua berpendapat bahwa sudah dari mulai Setjen KY sampai dengan Setjen DPD RI menyampaikan sudah kami tindak lanjuti hasil temuan BPK RI. Kalau bisa melalui pertemuan ini kami minta Pak tadi saya tanya Sekretariat tanggal 2 siklus anggaran yang menentukan apakah ada penambahan dari keempat Lembaga Negara ini. Jadi supaya memperkuat argumen Pimpinan Komisi III dan Anggota Komisi III tolong yang sudah ditindak lanjuti itu diberikan jawaban tertulis Pak. Karena kalau kata orang Medan tidak katanya-katanya dari mulai Setjen KY, MK, MA, kemudian MPR RI dan DPD RI kita setuju ya Pak Arteri Pak Suding ya. Jadi ini kita mungkin pendekatannya begitu nanti anggaran Pak karena semuanya membuka temuan BPK RI. Nah temuan BPK RI itu tentu kita kawal ditindak lanjuti tidak. Sebenarnya kalau kita mau jujur KPK paling gampang melakukan proses penegakan hukum temuan BPK RI saja lihat mana yang diatas 50 miliar, mana yang diatas 100 miliar sudah proses saja karena itu sudah setengah matang itu kalau temuan BPK RI. Berarti tanggal 2 itu hari Selasa mungkin ya apa Rabu kalau bisa Jumat sudah sama kami dan Sekretariat bisa memberikan ini ke Anggota Komisi sekaligus nanti menjadi bahan dari Bapak/Ibu Anggota Komisi III apakah MA, MK, KY, MPR RI dan DPD RI patut kita perjuangkan penambahannya. Karena tentu Pimpinan Komisi III berkomunikasi dengan Pimpinan Banggar Pak itu yang pertama.

Yang kedua khusus untuk MK, KY dan MA ini memang karena itu kami tadi membatasi pertanyaan diluar kaitan dengan anggaran tetapi ini bagian tidak terpisahkan Pak dalam rangka hubungan kemitraan kita dengan KY, MK dan MA. Khususnya MA di Komisi III ini banyak cerita soal MA ini Pak itu baru sebagian curhat dari Anggota Komisi III. Kalau Pak Pudjo dalam bagaimana tadi Anggota Komisi III menyampaikan bahwa mau masuk Mahkamah Agung saja Komisi III harus ada janji karena ada portalnya itu. Padahal begitu akomodatifnya Komisi III termasuk soal pilihan-pilihan Hakim Agung yang diinginkan Mahkamah Agung berapa karir, berapa non karir dan kamar mana yang perlu diinikan. Terus terang saja Pak Pudjo Hakim Agung itu kalau sudah jadi ditali pun tidak bisa Pak padahal banyak kawan-kawan tidak ngomong perkara dan jujur saja juga, sebentar Pak Arteria Dahlan tadi sudah ngomong giliran saya. Kita ke daerah juga yang paling tidak peduli itu adalah Mahkamah Agung. Yang ditunjukin selalu saja kantornya yang jelek mayoritas Komisi III ini latar belakangnya advokat Pak Pudjo.

Banyak tahu juga Hakim Agung, Hakim Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri itu kaya-kayanya setengah mati, anak-anaknya sekolah di luar negeri. Ini advokat-advokat yang ada disini diatas 10 tahun semua Pak tidak ada yang dibawah 10 tahun jadi tahu betul hakim itu. Itu bedanya Polisi sama Jaksa tidak suka pura-pura tetapi kalau hakim banyak pura-puranya pura-pura miskin terutama. Nah itu yang bisa kami sampaikan terakhir ketiga informasi dari Sekretariat siklus anggaran tanggal 2 nanti yang mana

ditambah anggarannya akan dipanggil kalau tidak dipanggil berarti tidak ditambah anggarannya Pak. Itu saja terima kasih mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam pertemuan ini.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan demikian rapat ini kami nyatakan ditutup.

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 17.05 WIB)

Jakarta, 24 Juni 2020
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001